



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN 2017

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR

TAHUN 2016

PEMERINTAH KOTA DENPASAR



**NOTA KESEPAKATAN
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2016**



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA DENPASAR**

NOMOR : 415.4 / 26 / KB / BKS / 2016
NOMOR : 415.4 / 1136 / DPRD / 2016

TANGGAL : 26 AGUSTUS 2016

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, SE.,M.Si.
Jabatan : Walikota Denpasar
Alamat kantor : Jalan Gajah Mada Nomor 1 Denpasar

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Denpasar.

2. a. Nama : I Gusti Ngurah Gede, SH.
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
Alamat Kantor : Jalan Melati Nomor 17 Denpasar
- b. Nama : I Wayan Mariyana Wandhira, ST.
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
Alamat Kantor : Jalan Melati Nomor 17 Denpasar
- c. Nama : Drs. A. A. Ketut Asmara Putra
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
Alamat Kantor : Jalan Melati Nomor 17 Denpasar
- d. Nama : Made Muliawan Arya, SE.
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
Alamat Kantor : Jalan Melati Nomor 17 Denpasar

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017, diperlukan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2017 yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2017.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2017 yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2017, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2017 dan RAPBD Tahun Anggaran 2017.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2017 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2017.

Denpasar, 26 Agustus 2016

WALIKOTA DENPASAR
selaku,
PIHAK PERTAMA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA DENPASAR
PIHAK KEDUA

IDA BAGUS RAI DHARMAWIJAYA MANTRA, SE.,M.SI,

I GUSTI NGURAH GEDE, SH.
KETUA

I WAYAN MARIYANA WANDHIRA, ST.
WAKIL KETUA

DRS. A. A. KETUT ASMARA PUTRA
WAKIL KETUA

MADE MULIAWAN ARYA, SE.
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan KUA	1
1.2 Tujuan Penyusunan KUA	3
1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA	4
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	7
2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun 2016	7
2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun 2017	9
BAB III ASUMSI – ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RAPBD	12
3.1 Asumsi Dasar	12
3.2 Laju Inflasi	12
3.3 Pertumbuhan PDRB	13
3.4 Lain – Lain Asumsi	13
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH	14
4.1 Pendapatan Daerah	14
4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah	14
4.1.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....	14
4.1.3. Upaya – Upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah.....	15
4.2 Belanja Daerah.....	16
4.2.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah.....	16
4.2.2. Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga	18

4.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala, Strategi Dan Prioritas Pembangunan Daerah.....	20
4.2.4. Kebijakan Belanja Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah	23
4.3 Pembiayaan Daerah.....	35
4.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	35
4.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	35
BAB V PENUTUP	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran. Artinya bahwa penetapan kebijakan serta target pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan daerah dalam APBD merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sangat menentukan kualitas APBD yang tersusun dapat realistis, rasional dan akuntabel sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Salah satu tahapan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA). Dari sisi legal, Pasal 310 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah dalam menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD. Hal ini sejalan dengan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengamanatkan bahwa dalam penyusunan KUA dan PPAS Kepala Daerah berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal ini berarti bahwa proses penyusunan KUA harus mengikuti program dan kegiatan yang telah tercantum pada RKPD. Dengan kata lain, dokumen KUA harus searah dengan RKPD. Secara substansi dokumen KUA Tahun Anggaran 2017 adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk tahun 2017. Dengan demikian, maka dokumen KUA tahun 2017 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun anggaran 2017 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2017. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

Berdasarkan wewenang otonomi yang diberikan kepada daerah, pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan menetapkan kebijakan umum yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal (1) angka (31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, mendefinisikan Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Pengertian kebijakan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal (1) angka (15) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. Sedangkan pengertian program sebagaimana dirumuskan dalam pasal (1) ayat (16) Undang-Undang dimaksud adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Kebijakan merupakan suatu kerangka kerja, sebagai pedoman dalam pengimplementasian tujuan-tujuan pembangunan kedalam program-program kerja. Kebijakan umum secara konseptual berkaitan dengan perencanaan dan strategi atau langkah-langkah yang diambil. Dengan demikian, kebijakan umum yang berkaitan dengan penyusunan anggaran belanja daerah (APBD) bertalian dengan perencanaan pembangunan dan langkah-langkah implementasinya. Sesuai ketentuan dalam pasal 85 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017, menjadi salah satu dokumen perencanaan yang dijadikan acuan dalam penyusunan PPAS dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017.

KUA disusun senantiasa berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi maupun prinsip hukum. Prinsip ekonomi meliputi prinsip efektivitas, efisiensi dan manfaat, artinya, penyusunan KUA diharapkan dilakukan secara cermat sehingga KUA yang ditetapkan dapat dijalankan secara efektif sesuai tujuan dan sasaran. Sedangkan prinsip hukum yaitu prinsip tertib pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundangan sesuai azas legalitas (*governance by the law*).

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KUA

Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2017 bertujuan untuk :

1. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2017 yang akuntabel yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indikator makro lainnya guna dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan daerah dan APBD tahun anggaran 2017.
2. Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2017 yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan APBD Kota Denpasar tahun anggaran 2017.
3. Menyusun kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang komprehensif dan sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2017
4. Menyusun pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2017 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran.

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KUA

Peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai dasar hukum penyusunan KUA sebagai berikut :

- (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- (6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- (8) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- (9) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- (10) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- (11) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- (12) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- (13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- (14) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- (15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- (16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- (17) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2017.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. PERKEMBANGAN INDIKATOR MAKRO EKONOMI DAERAH TAHUN 2016

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam pembangunan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang mantap dan berkualitas akan berpengaruh terhadap pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu, historis pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk dijadikan dasar perencanaan pembangunan daerah.

Sesuai dengan kebijakan makro ekonomi daerah Kota Denpasar tahun 2016 yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Denpasar tahun 2016 yang diarahkan untuk mendorong serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi terutama dalam hal mengantisipasi jumlah angkatan kerja, pengangguran dan kemiskinan. Pembangunan ekonomi Kota Denpasar masih dihadapkan sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara arif dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata antara lain (1) percepatan pertumbuhan ekonomi; (2) menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif; (3) ketersediaan infrastruktur yang belum terlalu memadai; (4) meningkatkan daya saing dengan mendorong pertumbuhan ekspor untuk merangsang penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan bermutu; (5) memantapkan kembali kinerja perekonomian dan pemberdayaan masyarakat pedesaan melalui peningkatan pemberdayaan kelompok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), LPD dan lembaga lainnya agar mampu memperbesar daya serapnya terhadap tenaga kerja.

Sesuai dengan kebijakan makro ekonomi tersebut diatas dan berdasarkan kondisi, potensi, dan permasalahan yang dihadapi serta

memperhatikan perekonomian yang telah dicapai, maka perkiraan makro ekonomi tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi daerah Kota Denpasar pada tahun 2016 direncanakan sebesar 7,05%. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7,05% maka peranan industri pariwisata yang merupakan sektor unggulan Kota Denpasar sangat terkait. Disisi lain, peranan investasi, ekspor dan konsumsi rumah tangga yang dibentuk oleh sektor primer, sekunder (industri, listrik, gas, air bersih dan bangunan) dan sektor tersier (perdagangan, hotel, restoran, angkutan, perbankan dan jasa-jasa) hendaknya ditingkatkan.

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto adalah total nilai tambah yang dihasilkan dari seluruh produksi sektor-sektor ekonomi. PDRB Kota Denpasar tahun 2016 atas dasar harga berlaku diperkirakan mencapai Rp 44.395,42 milyar. Target tersebut akan dapat diwujudkan apabila pemanfaatan produk-produk lokal terus meningkat serta ditunjang dengan harga yang relatif stabil.

3. Struktur Ekonomi

Dominasi industri pariwisata masih menjadi tumpuan peningkatan perekonomian Kota Denpasar. Oleh karena itu, struktur perekonomian Kota Denpasar tahun 2016 diharapkan berasal dari kontribusi sektor tersier (perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, perbankan dan jasa-jasa) dan sektor sekunder (industri pengolahan, listrik, gas, air bersih dan bangunan). Meski demikian untuk menjaga keseimbangan perekonomian daerah Kota Denpasar, peranan sektor primer dan sekunder diupayakan mengalami peningkatan sehingga akan memperkuat kehandalan perekonomian Kota Denpasar. Strategi ini perlu dilakukan untuk menjaga pertumbuhan industri pariwisata yang rentan terhadap dampak berbagai isu baik lokal, regional maupun internasional.

4. PDRB Perkapita

Berdasarkan perkiraan laju pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar tahun 2016 yang mencapai 7,05%, maka PDRB perkapita ditargetkan sebesar Rp. 30.678.998,15

5. Inflasi

Untuk menjaga stabilitas perekonomian daerah maka inflasi sebisa mungkin dikendalikan atau terjadi penurunan laju inflasi setiap tahunnya agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Inflasi Kota Denpasar tahun 2016 di prediksi mencapai 7,93%

6. Kesempatan Kerja

Kondisi ketidakseimbangan antara angkatan kerja dan kesempatan kerja dengan pencari kerja yang ada di kota Denpasar menyebabkan terjadinya pengangguran. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk menampung tenaga kerja yang masih menganggur. Pada tahun 2016 diperkirakan tingkat pengangguran terbuka (pencari kerja) akan mencapai 2,64%.

7. Kemiskinan

Melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan serta perkiraan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,05%, maka jumlah penduduk miskin di Kota Denpasar pada tahun 2016 diperkirakan tidak lebih dari 2,00% jumlah penduduk Kota Denpasar.

2.2. RENCANA TARGET EKONOMI MAKRO DAERAH TAHUN 2017

Melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi tahun-tahun sebelumnya dan sesuai dengan kebijakan makro ekonomi yang telah ditetapkan berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan yang dihadapi serta memperhatikan perkembangan perekonomian yang telah dicapai, maka proyeksi makro ekonomi Kota Denpasar tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar akan bergerak positif diperkuat oleh adanya dukungan dari sektor jasa-jasa serta menguatnya konsumsi rumah tangga. Melihat capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2015 sebesar 6,76% dan perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sebesar 7,05% maka pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar tahun 2017 diperkirakan mencapai 7,07% (hasil proyeksi Tim). Laju pertumbuhan ekonomi di Kota Denpasar ditekankan pada pemerataan secara proporsional di setiap Kecamatan dengan tetap memperhatikan trend pertumbuhan ekonomi. Untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi tersebut, diperlukan kebijakan ekonomi yang benar-benar mampu memulihkan aktivitas perekonomian Kota Denpasar.

2. Struktur Ekonomi

Sebagaimana struktur ekonomi tahun-tahun sebelumnya maka pada tahun 2017 struktur perekonomian Kota Denpasar masih sangat bertumpu pada sektor tersier (perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, perbankan dan jasa-jasa), sektor primer (pertanian dan penambangan/penggalan) dan sektor sekunder (industri pengolahan, listrik, air bersih dan bangunan).

3. Inflasi

Dengan melihat perkembangan inflasi dua tahun terakhir yaitu inflasi tahun 2015 yang mencapai 6,54% dan pada tahun 2016 diprediksi 7,93% maka inflasi Kota Denpasar di tahun 2017 diproyeksikan 7,88%.

4. Kesempatan kerja

Target ketenagakerjaan yang harus mendapat perhatian yaitu :

- Peningkatan kualitas pencari kerja yang relatif masih rendah dan kurang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

- Meningkatkan fungsi-fungsi lembaga hubungan industrial secara maksimal untuk mengurangi kesenjangan komunikasi antara pekerja dengan pengusaha.
- Membayar upah pekerja sesuai UMK dan mengikutsertakan program BPJS sebagai fasilitas kesejahteraan pekerja

5. Kemiskinan

Melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan seperti Program Pengembangan Perumahan, Program Bantuan Sosial, Program Raskin, Program Ketahanan Pangan dan lain-lain serta dengan memperkirakan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,07% maka persentase penduduk miskin di Kota Denpasar pada tahun 2017 diperkirakan mencapai tidak lebih dari 2,00% dari total jumlah penduduk Kota Denpasar.

BAB III
ASUMSI – ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. ASUMSI DASAR

Asumsi dasar yang mempengaruhi APBD adalah (1) Kondisi ekonomi terus mengalami pertumbuhan secara berkelanjutan, (2) Penerimaan daerah tidak mengalami penurunan, (3) Kinerja pembangunan yang dapat dilihat dari capaian IPM semakin meningkat, dan (4) Stabilitas keamanan semakin kondusif. Asumsi non makro yang diduga akan berpengaruh juga terhadap APBD adalah adanya upaya peningkatan kinerja Birokrasi di jajaran Pemerintah Kota Denpasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada seluruh aspek dan bidang pembangunan.

3.2. LAJU INFLASI

Laju inflasi Kota Denpasar tahun 2017 diproyeksikan sebesar 7,88 persen. Tingkat stabilitas inflasi sebagai salah satu indikator makro ekonomi yang berkaitan langsung dengan tingkat kesejahteraan masyarakat sudah selayaknya dijaga. Kenaikan harga jelas akan memberikan rangsangan terhadap kegiatan produksi, namun kenaikan harga yang di luar batas toleransi akan merugikan masyarakat selaku konsumen melalui penurunan daya beli sehingga sekaligus menurunkan pula tingkat kesejahteraannya. Hal ini perlu upaya-upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga agar perekonomian dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Perkembangan laju inflasi PDRB Kota Denpasar tidak terlepas dari kondisi perekonomian nasional maupun regional, yang berada pada ekonomi yang mulai stabil setelah dilanda krisis yang berkepanjangan. Hal ini akan memberikan pengaruh terhadap laju inflasi.

3.3. PERTUMBUHAN PDRB

Berdasarkan rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 diasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 7,1 persen, pengangguran sebesar 5,0 persen sampai dengan 5,3 persen, angka kemiskinan sebesar 8,5 persen sampai dengan 9,5 persen dan IPM sebesar 75,7. Asumsi-asumsi diatas sudah memperhitungkan berbagai fenomena perkembangan ekonomi baik nasional maupun perkembangan ekonomi global yang saling mempengaruhi. Namun demikian, perkembangan-perkembangan gejolak ekonomi dunia tetap harus diwaspadai karena bergerak secara dinamis. Sedangkan pembangunan ekonomi Kota Denpasar yang sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi perekonomian nasional maupun global tahun 2017 tetap diprioritaskan pada sektor tersier (perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan dan jasa-jasa). Sektor ini telah mampu menciptakan beragam peluang yang dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar tahun 2017 yang diproyeksi sebesar 7,07 persen, stabilitas keamanan nasional maupun regional serta iklim investas yang kondusif harus tetap terjaga.

3.4. LAIN-LAIN ASUMSI

Mempertimbangkan situasi ekonomi global dan domestik, pemerintah telah berupaya meningkatkan pengamanan, diharapkan dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat keamanan wilayah nasional maupun daerah mampu diwujudkan sehingga tidak mengurangi minat wisatawan asing maupun domestik untuk berkunjung ke Kota Denpasar. Demikian pula, sejalan dengan makin kondusifnya kondisi daerah Bali, kunjungan wisatawan baik domestik maupun manca negara untuk dua tahun terakhir ke Kota Denpasar secara perlahan menunjukkan peningkatan.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1. PENDAPATAN DAERAH

4.1.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH

Kebijakan pendapatan daerah tahun 2017 yang merupakan perkiraan yang terukur secara nasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum, diarahkan kepada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah:

1. Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan;
2. Penggalan potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan Peraturan Perundang-undangan, terutama diluar Pajak dan retribusi Daerah;
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan system informasi yang berbasis teknologi informasi;
4. Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan dukungan antar Perangkat Daerah yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah;
5. Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
6. Meningkatkan partisipasi dan peranan pihak ketiga penyediaan biaya pembangunan daerah;
7. Khusus untuk Pajak Daerah, peningkatan pengelolaan Pajak dilakukan dengan memaksimalkan objek pajak.

4.1.2. TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA PERIMBANGAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH.

Pada tahun 2017, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar ditargetkan sebesar Rp. 791.259.922.225,56 terdiri dari pendapatan yang

bersumber dari pajak daerah yang merupakan penerimaan terbesar PAD sebesar Rp. 573.909.173.000,00; retribusi daerah sebesar Rp. 46.519.000.000,00; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp.28.074.220.639,56; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp.142.757.528.586,00

Selain PAD, penerimaan daerah juga bersumber dari Dana Perimbangan yang terdiri dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak ditargetkan sebesar Rp. 50.142.225.833,00; Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.661.794.756.000,00.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp. 225.506.648.284,57 yang terdiri dari Bagi Hasil dari Provinsi sebesar Rp. 203.643.643.284,57 dan Dana Penyesuaian dan otonomi khusus Rp. 21.863.005.000,00.

Total Pendapatan Daerah tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp.1.728.703.552.343,13

**) sumber data : Bagian Keuangan Setda Kota Denpasar*

4.1.3. UPAYA – UPAYA PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN DAERAH

Program-program yang ditempuh dalam peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah adalah :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Untuk lebih lengkapnya, pengelolaan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Denpasar, disajikan dalam tabel 4.1. tentang Target Pendapatan Pemerintah Kota Denpasar tahun 2017.

Tabel 4.1
TARGET PENDAPATAN DAERAH TA 2017

NO	URAIAN	TARGET TAHUN 2017 (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH	1.728.703.552.343,13
4.1	Pendapatan Asli Daerah	791.259.922.225,56
4.1.1	Pajak Daerah	573.909.173.000,00
4.1.2	Retribusi Daerah	46.519.000.000,00
4.1.3	Bagi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	28.074.220.639,56
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	142.757.528.586,00
4.2	Dana Perimbangan	711.936.981.833,00
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	50.142.225.833,00
4.2.2	Dana Alokasi Umum	661.794.756.000,00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	-
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	225.506.648.284,57
4.3.1	Hibah	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	203.643.643.284,57
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	21.863.005.000,00
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi Pemerintah Daerah lainnya	-

**) sumber Bagian Keuangan Setda Kota Denpasar*

4.2. BELANJA DAERAH

4.2.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN BELANJA DAERAH

Arah kebijakan belanja daerah merupakan arah yang mengatur kebijakan tentang kewajiban-kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan kekayaan bersih. Kebijakan ini digunakan dalam rangka mengatur pendanaan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan per undang-undangan.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota,

yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan dan fungsi penunjang urusan yang ditetapkan dengan perundang-undangan. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun 2017 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah (PD) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan.

Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan Belanja pegawai, pemenuhan belanja Rutin perkantoran, Belanja bantuan keuangan, tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah walaupun pendapatan daerah Kota Denpasar dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini berdampak pada kemampuan riil keuangan daerah yang cenderung semakin menurun.

Pada tahun 2017 komposisi Belanja Tidak Langsung (BTL) lebih besar dari pada Belanja Langsung (BL) yaitu BL berbanding BTL sebesar 44,30% berbanding 55,70%, Pemerintah Kota Denpasar tetap berupaya mengutamakan pencapaian hasil melalui berbagai program pembangunan yang menyentuh langsung pada masyarakat sesuai kebutuhannya. Belanja Tidak Langsung (BTL) pada tahun 2017 direncanakan sebesar Rp. 1.012.675.968.448,60 menurun 18,40% atau sebesar Rp. 228.407.885.067,45 dari APBD pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.241.083.853.516,05.

Disamping belanja tidak langsung, kebijakan belanja daerah juga diarahkan dalam rangka memenuhi beban pengeluaran atas belanja langsung yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Kebijakan belanja langsung dimaksudkan untuk membiayai seluruh kegiatan-kegiatan pembangunan dalam tahun 2017 baik yang bersifat prioritas maupun penunjang dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan dan pemecahan masalahnya. Pada RAPBD

Tahun Anggaran 2017, Belanja Langsung direncanakan sebesar Rp.805.527.583.894,53 dengan komposisi Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 1.012.675.968.448,60 atau 55,70% dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp.805.527.583.894,53 atau 44,30%.

4.2.2. KEBIJAKAN BELANJA PEGAWAI, BUNGA, SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

4.2.2.1. BELANJA PEGAWAI

Penganggaran belanja pegawai dipergunakan untuk membayar gaji pokok dan tunjangan termasuk pembayaran gaji ke-13 dan ke-14, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan memperhitungkan adanya acres 2,5%.

4.2.2.2. BELANJA SUBSIDI

Tidak mengalokasikan belanja subsidi karena pada prinsipnya belanja subsidi hanya boleh diperuntukkan kepada perusahaan/ lembaga yang hasil produksinya merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga harga jual produk tersebut terjangkau masyarakat.

4.2.2.3. BELANJA HIBAH

Penganggaran belanja hibah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menyatakan hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

4.2.2.4. BANTUAN SOSIAL

Penganggaran belanja bantuan sosial mengacu pada Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menyatakan bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

4.2.2.5. BELANJA BAGI HASIL

Penganggaran belanja bagi hasil dirancang untuk belanja bagi hasil kepada desa dengan perhitungan 10% dari pajak dan retribusi setelah dikurangi kewajiban yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku.

4.2.2.6. BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Penganggaran belanja bantuan keuangan diperuntukkan untuk bantuan keuangan kepada provinsi, bantuan keuangan desa, bantuan keuangan partai politik.

4.2.2.7. BELANJA TAK TERDUGA

Penganggaran belanja tak terduga ditujukan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan.

Adapun target belanja tidak langsung maupun belanja langsung yang direncanakan pada APBD 2017 sebagaimana tertuang dalam tabel 4.2.

Tabel 4.2
PROYEKSI BELANJA DAERAH TA 2017

NO	URAIAN	TARGET TAHUN 2017
5.	BELANJA DAERAH	1.818.203.552.343,13
5.1	Belanja Tidak Langsung	1.012.675.968.448,60
5.1.1	Belanja pegawai	720.943.429.056,47
5.1.4	Belanja hibah	71.279.414.600,00
5.1.5	Belanja bantuan sosial	3.498.000.000,00
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	62.042.817.300,00
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	151.912.307.492,13
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00
5.2	Belanja Langsung	805.527.583.894,53
5.2.1	Belanja pegawai	15.013.784.000,00
5.2.2	Belanja barang dan jasa	529.272.275.610,53
5.2.3	Belanja modal	261.241.524.285

**) sumber Bagian Keuangan Setda Kota Denpasar*

4.2.3. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH, KENDALA, STRATEGI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi, maka kebijakan ekonomi tahun 2017 diarahkan untuk meningkatkan investasi daerah, percepatan pembangunan sarana dan prasarana, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, memperkuat perekonomian masyarakat dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka pencapaian kerangka ekonomi makro yang diinginkan Pemerintah Kota Denpasar akan selalu meningkatkan peranan dan partisipasi aktif masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan.

Kebijakan ekonomi daerah dirumuskan untuk menggambarkan hubungan yang jelas antara tujuan utama pembangunan daerah dengan capaian indikator makro ekonomi daerah dan bagaimana antar komponen itu saling mempengaruhi. Kebijakan ekonomi daerah disatu sisi harus mampu menempatkan indikator makro ekonomi daerah sebagai tujuan yang harus dijaga asumsi-asumsinya dan disisi lain

memberikan panduan umum bagaimana tujuan ekonomi daerah harus dicapai sebagai salah satu capaian utama pembangunan daerah. Pemulihan stabilitas pertumbuhan perekonomian daerah juga terus dipacu melalui kebijakan lintas sektoral dalam rangka peningkatan sarana prasarana penunjang perekonomian daerah yang mampu memperluas lapangan kerja, menyerap tenaga kerja dan meningkatkan investasi.

Lapangan usaha sektor perdagangan hotel dan restoran di Kota Denpasar memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan bagi perekonomian daerah, dapat menciptakan iklim yang positif dan identitas Kota Denpasar sebagai pusat pelayanan jasa dan perdagangan mendukung pengembangan pariwisata.

Kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk mendorong serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi kedepan terutama dalam hal mengantisipasi jumlah angkatan kerja, pengangguran dan kemiskinan. Oleh sebab itu pertumbuhan ekonomi didorong melalui peningkatan investasi disamping padat modal juga padat karya, sehingga dengan pola seperti itu permasalahan angkatan kerja, kemiskinan dan pengangguran bisa diturunkan, dan pada gilirannya salah satu sasaran utama pertumbuhan ekonomi adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai dapat menyerap jumlah pencari kerja, tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahunnya akan terdistribusikan karena perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha selalu tercipta melalui iklim investasi yang kondusif, sehingga penduduk memperoleh kesempatan secara langsung menikmati hasil pembangunan.

Pengupayaan pertumbuhan ekonomi diharapkan diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan upaya diatas diperlukan strategi pembangunan yang berbasis pada masyarakat terutama pada golongan usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di Kota Denpasar dengan pengeluaran modal dan infrastruktur yang memadai terutama pada sektor riil. Manfaat dari hal tersebut telah kita

rasakan karena selama terjadinya krisis justru usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat bertahan dan masih berkembang.

a. Strategi

Berikut ini disampaikan beberapa strategi pokok yang dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah, yaitu:

1. Peningkatan produktivitas sumberdaya manusia, kualitas tenaga kerja, dan kemampuan penguasaan teknologi;
2. Pengembangan pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam (hayati darat-laut, mineral, energi alam) dan pengembangan lahan;
3. Pengembangan institusi ekonomi yang mendukung peningkatan kegiatan produksi, keberdayaan ekonomi rakyat, dan daya saing perekonomian daerah;
4. Peningkatan penyediaan infrastruktur antar wilayah (jaringan jalan raya, transportasi laut dan udara, jalan dan infrastruktur kawasan (jalan, air bersih, waduk, irigasi, sanitasi, drainase, pengolahan sampah, tenaga listrik, dan telekomunikasi);
5. Peningkatan kegiatan investasi di sektor produksi (sektor riil) untuk mengurangi pengangguran terbuka dan meningkatkan jaminan lapangan kerja penduduk yang bekerja);
6. Peningkatan integrasi ekonomi antar daerah melalui penguatan jaringan ekonomi antar daerah.

b. Prioritas

Sebagai penjabaran dari agenda prioritas pembangunan Nasional di implementasikan ke dalam 13 prioritas pembangunan Kota Denpasar sebagai berikut : Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, Pendidikan, Kesehatan, Penanggulangan Kemiskinan, Infrastruktur, Kebudayaan, Kreatifitas dan Inovasi, Ketahanan Pangan, Perekonomian, Iklim Infestasi dan Iklim Usaha, Kesejahteraan Rakyat, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, Politik, Hukum, Keamanan dan Ketertiban.

4.2.4. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH

Belanja Daerah pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar pada KUA Tahun 2017 disesuaikan lagi dengan kondisi keuangan Pemerintah Kota Denpasar dengan skala prioritasnya dan diutamakan untuk memenuhi program yang wajib dilaksanakan setiap tahun oleh Perangkat Daerah.

Adapun program pembangunan prioritas dari Perangkat Daerah antara lain sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan sebagai Perangkat Daerah pelayanan dasar pendidikan mengutamakan :
 - a. Program Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun.
 - b. Program Pendidikan Non Formal
 - c. Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
 - d. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
 - e. Program Peningkatan Mutu dan Pendidikan Dasar

2. Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan program prioritas :
 - a. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
 - b. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

3. Dinas Kesehatan, merupakan Perangkat Daerah pelayanan dasar kesehatan dengan program prioritas :
 - a. Program Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan
 - b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
 - c. Program Pengawasan Obat Dan Makanan
 - d. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
 - e. Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat
 - f. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
 - g. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
 - h. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
 - i. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
 - j. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

- k. Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
 - l. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
 - m. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita
 - n. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
 - o. Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan
 - p. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak
4. RSUD Wangaya, program prioritas :
- a. Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan program :
- a. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
 - b. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 - c. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
 - d. Program Pengembangan dan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya
 - e. Program Pemanfaatan Ruang
 - f. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan program prioritas sebagai berikut :
- a. Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
 - b. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
 - c. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam
 - d. Program Tanggap Darurat Kebencanaan
7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan program prioritas:
- a. Program Pemanfaatan Ruang
 - b. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

8. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan merupakan Perangkat Daerah Penunjang Urusan di bidang perencanaan pembangunan dengan program prioritas :
 - a. Program Pengembangan Data/Informasi
 - b. Program Kerjasama Pembangunan
 - c. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh
 - d. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
 - e. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - f. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
 - g. Program Perencanaan Sosial Dan Budaya
 - h. Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam

9. Dinas Perhubungan dengan program prioritas :
 - a. Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ
 - b. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
 - c. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan
 - d. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
 - e. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
 - f. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kendaraan Tidak Bermotor

10. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dengan program prioritas :
 - a. Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup
 - b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
 - c. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
 - d. Program Pengembangan dan Pengelolaan Pertamanan

11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan program prioritas
 - a. Program Penataan Administrasi Kependudukan

12. Dinas Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan program prioritas :
 - a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
 - b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
 - c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
 - d. Program Keluarga Berencana
 - e. Program Pelayanan Kontrasepsi
 - f. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
 - g. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
 - h. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
 - i. Program Pengembangan Model Operasional BKB – POSYANDU, Paud

13. Dinas Sosial dengan program prioritas
 - a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
 - b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 - c. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma
 - d. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

14. Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi dengan Program prioritas :
 - a. Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja

- b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
 - c. Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan program prioritas
- a. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif
 - b. Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif UKM
 - c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
 - d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
 - e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
16. Dinas Kebudayaan, dengan program prioritas :
- a. Program Pengembangan Nilai Budaya
 - b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
 - c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
17. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, dengan program prioritas :
- a. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
 - b. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - c. Program Pendidikan Politik Masyarakat
18. Satuan Polisi Pamong Praja dan LINMAS, merupakan SKPD yang menjaga keamanan dan ketentraman dengan program prioritas :
- a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
 - b. Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal
 - c. Program Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

19. Sekretariat Daerah, dengan program prioritas masing-masing bagian
 - a. Bagian Hukum dengan Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur dan penataan peraturan perundang-undangan
 - b. Bagian Perekonomian dengan program kerjasama pembangunan, Pengawasan dan Pengendalian Inflasi Daerah, peningkatan ketahanan pangan, pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, pengembangan sistem pendukung usaha bagi pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, peningkatan promosi dan kerjasama investasi, peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
 - c. Bagian Organisasi dengan Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - d. Bagian Umum dengan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - e. Bagian Program Pembangunan dengan Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, Program Koordinasi Pembangunan Daerah, Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH
 - f. Bagian Humas Dan Protokol Dengan Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Informasi, Program Kerjasama Dengan Mass Media.
 - g. Bagian Pemerintahan Dengan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Program Kerjasama Pembangunan, Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

- h. Bagian Kesra Dengan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Program Pengembangan Nilai Budaya
 - i. Bagian Kerjasama dengan Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Program Pengembangan Kemitraan
20. Sekretariat DPRD, dengan program prioritas :
- a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - b. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
 - c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
21. Badan Pendapatan Daerah, dengan program prioritas :
- a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - b. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
22. Badan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah, dengan program prioritas :
- a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - b. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - d. Program Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
 - e. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - f. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Kebijakan KDH
23. Inspektorat, merupakan Perangkat Daerah pengawasan daerah dengan program prioritas :

- a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Kebijakan KDH
 - b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - c. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
 - d. Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
24. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dengan program prioritas :
- a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - b. Program Pendidikan Kedinasan
 - c. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
25. Kecamatan, prioritas program untuk masing-masing kecamatan
- a. **Kecamatan Denpasar Barat** dengan program sebagai berikut :
 - i. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - ii. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
 - iii. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - iv. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
 - v. Program Penataan Administrasi Kependudukan
 - vi. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
 - vii. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
 - viii. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi, Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat
 - ix. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
 - x. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
 - xi. Program Pengembangan Nilai Budaya.
 - b. **Kecamatan Denpasar Timur** dengan program sebagai berikut :
 - i. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - ii. Program Pendidikan Anak Usia Dini

- iii. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- iv. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- v. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- vi. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- vii. Program Penataan Administrasi Kependudukan
- viii. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
- ix. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
- x. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi, Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat
- xi. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
- xii. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
- xiii. Program Pengembangan Nilai Budaya
- xiv. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- xv. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

c. **Kecamatan Denpasar Selatan** dengan progra, sebagai berikut :

- i. Program Pendidikan Anak Usia Dini
- ii. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- iii. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- iv. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- v. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- vi. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- vii. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

- viii. Program Pengembangan Kinerja dan Pengelolaan Persampahan
 - ix. Program Penataan Administrasi Kependudukan
 - x. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
 - xi. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
 - xii. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi, Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat
 - xiii. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
 - xiv. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
 - xv. Program Pengembangan Nilai Budaya
 - xvi. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - xvii. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- d. **Kecamatan Denpasar Utara** dengan program sebagai berikut :
- i. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
 - ii. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - iii. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
 - iv. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - v. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
 - vi. Program Penataan Administrasi Kependudukan
 - vii. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
 - viii. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
 - ix. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
 - x. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi, Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat
 - xi. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

- xii. Program Pengembangan Nilai Budaya
- xiii. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

26. Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan program sebagai berikut :

- a. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
- b. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- c. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- d. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

27. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan program sebagai berikut :

- a. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- b. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
- c. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
- d. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
- e. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- f. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
- g. Program Penanggulangan Kemiskinan

28. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan program sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
- b. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
- c. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

29. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan program prioritas

- a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

30. Dinas Pertanian dengan program prioritas :
- a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
 - b. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
 - c. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
 - d. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
31. Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan dengan program prioritas :
- a. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
 - b. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
 - c. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
 - d. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
 - e. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
 - f. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
 - g. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
 - h. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
 - i. Program Perencanaan Pembangunan Peternakan, perikanan dan Kelautan
32. Dinas Pariwisata, dengan program prioritas :
- a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
 - b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
 - c. Program Pengembangan Kemitraan
33. Dinas Perindustrian, Ekonomi Kreatif dan Perdagangan dengan program prioritas :
- a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
 - b. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
 - c. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri
 - d. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi

- e. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- f. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
- g. Program Pengembangan Sentra Industri Potensial

4.3. PEMBIAYAAN DAERAH

4.3.1. KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Penerimaan pembiayaan Tahun 2017 pada KUA 2017 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya dipertahankan sebesar Rp. 100.000.000,00

4.3.2. KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

Arah kebijakan pembiayaan daerah merupakan arah tentang kebijakan yang mengatur semua penerimaan daerah yang perlu dibayar kembali dan/atau semua pengeluaran daerah yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah, kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA), Transfer dari dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, peneriman pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. kebijakana pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukkan bagi pembentukan Dana Cadangan, Investasi (Penyertaan Modal dan pemberian pembelian surat berharga/saham) pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan Sisa Lebih Perhitungan.

Untuk melihat dengan jelas Pembiayaan Daerah Kota Denpasar dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.3
PROYEKSI PEMBIAYAAN DAERAH TA 2017

NO	URAIAN	TARGET TAHUN 2017 (Rp)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	89.500.000.000,00
6.1	Penerimaan Pembiayaan	100.000.000.000,00
6.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)	100.000.000.000,00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	
6.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	
6.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	
6.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-
6.1.6	Penerimaan piutang daerah	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	10.500.000.000,00
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	10.500.000.000,00
6.2.3	Pembayaran Pokok Hutang	-
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	

**) sumber Bagian Keuangan Setda Kota Denpasar*

BAB V

PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2017 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Denpasar dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2017.

Denpasar, 26 Agustus 2016

WALIKOTA DENPASAR
selaku,
PIHAK PERTAMA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA DENPASAR
PIHAK KEDUA

IDA BAGUS RAI DHARMAWIJAYA MANTRA, SE.,M.SI,

I GUSTI NGURAH GEDE, SH.
KETUA

I WAYAN MARIYANA WANDHIRA, ST.
WAKIL KETUA

DRS. A. A. KETUT ASMARA PUTRA
WAKIL KETUA

MADE MULIAWAN ARYA, SE.
WAKIL KETUA

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA DENPASAR**

**JL. MARUTI 8 DENPASAR
TEL. (0361) 413357 FAX. (0361) 421822**

<http://bappeda.denpasarkota.go.id>



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH**

TAHUN 2017

PEMERINTAH KOTA DENPASAR



**NOTA KESEPAKATAN
PRIORITAS PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2017

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2016**



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA DENPASAR**

NOMOR : 415.4 / 27 / KB / BKS / 2016

NOMOR : 415.4 / 1137 / DPRD / 2016

TANGGAL : 26 AGUSTUS 2016

TENTANG

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD TAHUN ANGGARAN 2017**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, SE.,M.Si.
Jabatan : Walikota Denpasar
Alamat kantor : Jalan Gajah Mada Nomor 1 Denpasar

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Denpasar.

2. a. Nama : I Gusti Ngurah Gede, SH.
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
Alamat Kantor : Jalan Melati Nomor 17 Denpasar
- b. Nama : I Wayan Mariyana Wandhira, ST.
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
Alamat Kantor : Jalan Melati Nomor 17 Denpasar
- c. Nama : Drs. A. A. Ketut Asmara Putra
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
Alamat Kantor : Jalan Melati Nomor 17 Denpasar
- d. Nama : Made Muliawan Arya, SE.
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
Alamat Kantor : Jalan Melati Nomor 17 Denpasar

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017, perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2017 yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2017.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2017, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2017 yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan Perangkat Daerah, program dan kegiatan, dan belanja tidak langsung, serta rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2017.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2017 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Denpasar, 26 Agustus 2016

WALIKOTA DENPASAR
selaku,
PIHAK PERTAMA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA DENPASAR
PIHAK KEDUA

IDA BAGUS RAI DHARMAWIJAYA MANTRA, SE.,M.SI,

I GUSTI NGURAH GEDE, SH.
KETUA

I WAYAN MARIYANA WANDHIRA, ST.
WAKIL KETUA

DRS. A. A. KETUT ASMARA PUTRA
WAKIL KETUA

MADE MULIAWAN ARYA, SE.
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan PPAS	1
1.2 Tujuan Penyusunan PPAS	1
1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS	2
BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	5
2.1 Pendapatan Daerah	5
2.2 Penerimaan Pembiayaan Daerah	5
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH	7
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	35
4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan	35
4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan.....	41
4.3 Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga	118
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	119
BAB VI PENUTUP	120

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PPAS

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun dalam suatu sistem yang terintegrasi dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA).

Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara memuat substansi pokok sebagai berikut :

1. Skala prioritas pembangunan daerah;
2. Prioritas Program untuk masing-masing urusan;
3. Plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN PPAS

Seperti pada penyusunan Kebijakan Umum APBD maka penyusunan PPAS bertujuan :

1. Untuk memenuhi kewajiban yuridis penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Denpasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. PPAS ditetapkan dengan tujuan untuk dapat dijadikan pedoman dalam menyusun RAPBD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
3. Untuk membangun disiplin anggaran yang bersifat menyeluruh sesuai plafon yang telah disepakati.

4. Sebagai alat validasi relevansi dokumen perencanaan dengan dinamika kehidupan sosial budaya dan tuntunan aspirasi masyarakat yang sedang berkembang.
5. Sebagai dasar bagi DPRD untuk menilai Ranperda tentang APBD.
6. Sebagai dasar pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN PPAS

Penyusunan PPAS secara normatif merupakan salah satu tugas dan wewenang Pemerintahan Daerah Kota Denpasar untuk memenuhi aspirasi, kebutuhan daerah, pendapatan, belanja dan pembiayaan pelbagai aspek pembangunan daerah. Peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai dasar hukum penyusunan PPAS seperti pada penyusunan KUA adalah sebagai berikut :

- (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
- (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
- (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
- (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
- (5) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- (6) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
- (7) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - (8) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 - (9) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
 - (10) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 - (11) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - (12) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

- (13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
- (14) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
- (15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- (16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- (17) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2017.

BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

2.1. PENDAPATAN DAERAH

Pada tahun 2017 Pendapatan Daerah Kota Denpasar dirancang sebesar Rp.1.728.703.552.343,13 dan Pendapatan Asli Daerah dirancang sebesar Rp. 791.259.922.225,56. Pajak daerah yang merupakan penerimaan terbesar PAD ditargetkan sebesar Rp. 573.909.173.000,00. Retribusi daerah ditargetkan sebesar Rp. 46.519.000.000,00. Bagi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dirancang sebesar Rp. 28.074.220.639,56 dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dirancang sebesar Rp. 142.757.528.586,00.

Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak ditargetkan sebesar Rp. 50.142.225.833,00 dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 661.794.756.000,00.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp. 225.506.648.284,57 yang terdiri dari Bagi Hasil dari Provinsi sebesar Rp. 203.643.643.284,57 dan Dana Penyesuaian dan otonomi khusus Rp. 21.863.005.000,00.

2.2. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Penerimaan pembiayaan tahun 2017 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya diperhitungkan sebesar Rp. 100.000.000.000,00.

Target Pendapatan Daerah Tahun 2017 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
TARGET PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2017

NO	URAIAN	TARGET TAHUN 2017 (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH	1.728.703.552.343,13
4.1	Pendapatan Asli Daerah	791.259.922.225,56
4.1.1	Pajak Daerah	573.909.173.000,00
4.1.2	Retribusi Daerah	46.519.000.000,00
4.1.3	Bagi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	28.074.220.639,56
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	142.757.528.586,00
4.2	Dana Perimbangan	711.936.981.833,00
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	50.142.225.833,00
4.2.2	Dana Alokasi Umum	661.794.756.000,00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	-
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	225.506.648.284,57
4.3.1	Hibah	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	203.643.643.284,57
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	21.863.005.000,00
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi Pemerintah Daerah lainnya	-

**) sumber Bagian Keuangan Setda Kota Denpasar*

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Dilihat dari sisi pendapatan, kemampuan keuangan daerah sangat terbatas, oleh karena itu besaran belanja daerah disesuaikan dengan kapasitas anggaran yang tersedia agar terjadi keseimbangan antara pendapatan dengan belanja. Disamping itu penggunaan belanja daerah diarahkan untuk membiayai program/kegiatan yang prioritas, serta dilakukan secara efektif dan efisien. Prioritas belanja daerah yang disusun berdasarkan jumlah dana yang tersedia pada Tahun Anggaran 2017 diperuntukkan untuk Belanja Tak Langsung dan Belanja Langsung.

Belanja Tak Langsung diarahkan terutama untuk Belanja gaji, tambahan penghasilan, bantuan sosial, dan hibah sesuai ketentuan pada Permendagri Nomor 59 tahun 2007. Sedangkan Belanja Langsung diarahkan untuk belanja pembangunan dengan pengarahannya sesuai RKPD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2017.

Prioritas belanja pembangunan disusun menurut prioritas program pembangunan daerah sebagai berikut :

No	Agenda Prioritas (Nawacita)	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintah	Program Prioritas	Perangkat Daerah	
1	Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN	Politik, hukum, keamanan dan ketertiban	Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar			
			Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Satuan Polisi Pamong Praja
				2	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Satuan Polisi Pamong Praja
				3	Program Peningkatan Keamanan, Ketentraman, Dan Ketertiban	Satuan Polisi Pamong Praja
				4	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan	Kesbangpol

No	Agenda Prioritas (Nawacita)	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintah	Program Prioritas	Perangkat Daerah
				Lingkungan	
				5 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kesbangpol
				6 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kesbangpol
				7 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Kesbangpol
				8 Program Pendidikan Politik Masyarakat	Kesbangpol
			Penunjang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah		
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Satuan Polisi Pamong Praja
				2 Program Peningkatan Nasionalisme Sumber Daya Aparatur	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Membangun tata kelola Pemerintahan yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Reformasi birokrasi dan Tata Pemerintahan yang baik	Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar		
			Kesehatan	1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kec. Denut
				2 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Denut
				3 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kec. Denut
				4 Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kec. Densel
				5 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Densel
				6 Program pengembangan Lingkungan Sehat	Kec. Densel

No	Agenda Prioritas (Nawacita)	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintah	Program Prioritas	Perangkat Daerah
				7 Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kec. Densel
				8 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Kec. Densel
				9 Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kec. Dentim
				10 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kec. Dentim
				11 Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kec. Denbar
				12 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Denbar
				13 Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kec. Denbar
				14 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Kec. Denbar
				15 Program pengembangan Lingkungan Sehat	Kec. Denbar
				16 Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	17 Program pengembangan wawasan kebangsaan	Sekretariat (Bag. Pemerintahan)
				18 Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	Kec. Denut
				19 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kec. Denut
				20 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kec. Densel

No	Agenda Prioritas (Nawacita)	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintah	Program Prioritas	Perangkat Daerah
				21 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kec. Densel
				22 Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	Kec. Dentim
				23 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kec. Dentim
				24 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kec. Denbar
				25 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kec. Denbar
			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	26 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Kec. Densel
				27 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Kec. Denbar
				28 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
			Pendidikan	29 Program Pendidikan Anak Usia Dini	Kec. Densel
				30 Program Pendidikan Anak Usia Dini	Kec. Dentim
				31 Program Pendidikan Anak Usia Dini	Kec. Denbar
			Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	32 Program Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan dan Pemukiman	Kec. Denut
				33 Program Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan dan Pemukiman	Kec. Densel

No	Agenda Prioritas (Nawacita)	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintah	Program Prioritas	Perangkat Daerah
				34 Program Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan dan Pemukiman	Kec. Dentim
				35 Program Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan dan Pemukiman	Kec. Denbar
			Sosial	36 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Kec. Denut
				37 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Kec. Densel
				38 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Kec. Dentim
				39 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Kec. Denbar
Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar					
			Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	1 Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif UKM	Kec. Densel
				2 Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif UKM	Kec. Denbar
			Kearsipan	3 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				4 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				5 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Agenda Prioritas (Nawacita)	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintah	Program Prioritas	Perangkat Daerah
				6 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Kebudayaan	7 Program Pengembangan Nilai Budaya	Kec. Denut
				8 Program Pengembangan Nilai Budaya	Kec. Densel
				9 Program Pengembangan Nilai Budaya	Kec. Dentim
				10 Program Pengembangan Nilai Budaya	Kec. Denbar
			Kepemudaan Dan Olahraga	11 Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Kec. Denut
				12 Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Kec. Densel
				13 Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga	Kec. Dentim
				14 Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Kec. Denbar
			Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	15 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kec. Denut
				16 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kec. Densel
				17 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kec. Dentim
				18 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kec. Denbar
			Komunikasi Dan Informatika	19 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Sekretariat (Bag.Humas)
				20 Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Sekretariat (Bag.Humas)

No	Agenda Prioritas (Nawacita)	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintah	Program Prioritas	Perangkat Daerah
				21 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
				22 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
				23 Program kerjasama informasi dan media massa	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
			Lingkungan Hidup	24 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Kec. Densel
				25 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Kec. Dentim
				26 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Kec. Denbar
			Pangan	27 Program Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah	BPKAD
				28 Program Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah	Sekretariat (Bag.Pemerintahan)
				29 Program Penyelesaian Konflik-konflik pertanahan	Sekretariat (Bag.Pemerintahan)
				30 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	31 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Kec. Denut
				32 Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan	Kec. Denut

No	Agenda Prioritas (Nawacita)	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintah	Program Prioritas	Perangkat Daerah
				33 Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan	Kec. Densel
				34 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Kec. Densel
				35 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kec. Densel
				36 Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan	Kec. Densel
				37 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	Kec. Dentim
				38 Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan	Kec. Dentim
				39 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Kec. Denbar
				40 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Kec. Denbar
				41 Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan	Kec. Denbar
				42 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				43 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				44 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				45 Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Agenda Prioritas (Nawacita)	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintah	Program Prioritas	Perangkat Daerah
				46 Program penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	47 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kec. Denut
				48 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Kec. Denut
				49 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Kec. Densel
				50 Program Penguatan Kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Kec. Dentim
				51 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Kec. Denbar
				Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	52 Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi Dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat
			53 Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS		Kec. Denut
			54 Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi Dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat		Kec. Densel
			55 Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS		Kec. Densel
			56 Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi Dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat		Kec. Dentim

No	Agenda Prioritas (Nawacita)	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintah	Program Prioritas	Perangkat Daerah
				57 Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Kec. Dentim
				58 Program Keluarga Berencana	Kec. Denbar
				59 Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi Dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat	Kec. Denbar
				60 Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Kec. Denbar
			Perpustakaan	61 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Persandian	62 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Inspektorat
				63 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Sekretariat (Bag.Probang)
				64 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	BPKAD
			Statistik	65 Program Pengembangan Data/Informasi	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
			Urusan Pemerintah Pilihan		
			Pariwisata	1 Program Pengembangan Kemitraan	Sekretariat (Bag.Kerjasama)
				2 Program pengembangan pemasaran pariwisata	Sekretariat (Bag.Kerjasama)

No	Agenda Prioritas (Nawacita)	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintah	Program Prioritas	Perangkat Daerah
			Perdagangan	3 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Kec. Denut
				4 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Kec. Densel
				5 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Kec. Dentim
				6 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Kec. Denbar
			Pertanian	7 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Penunjang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah					
			Bidang Keuangan	1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD
				2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Sekretariat (Bag Organisasi)
				3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	BPKAD
				4 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD
				5 Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Set DPRD
				6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kec. Dentim

No	Agenda Prioritas (Nawacita)	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintah	Program Prioritas	Perangkat Daerah	
			Bidang Perencanaan Pembangunan	7 Program Kerjasama Pembangunan	Sekretariat (Bag.Pemerintahan)	
				8 Program kerjasama pembangunan	Sekretariat (Bag.Kerjasama)	
				9 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Kec. Denut	
				10 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Kec. Densel	
				11 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Kec. Dentim	
				12 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Kec. Denbar	
				13 Program Kerjasama Pembangunan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
				14 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
				15 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
				16 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
				17 Program Perencanaan pembangunan ekonomi	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
				18 Program Perencanaan Sosial Budaya	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
				19 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
				Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	20 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Inspektorat

No	Agenda Prioritas (Nawacita)	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintah	Program Prioritas	Perangkat Daerah
				21 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Inspektorat
				22 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	BPKAD
				23 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Sekretariat (Bag.Pemerintahan)
				24 Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Sekretariat (Bag.Pemerintahan)
				25 Program Pembinaan Kecamatan Dan Kelurahan	Sekretariat (Bag.Pemerintahan)
				26 Program Peningkatan Kerjasama antar pemerintah daerah	Sekretariat (Bag.Kerjasama)
				27 Program peningkatan disiplin aparatur	Sekretariat (Bag.Humas)
				28 Program peningkatan disiplin aparatur	Sekretariat (Bag.Humas)
				29 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Sekretariat (Bag.Humas)
				30 Program Penerapan Kepemerintahan yang baik	Sekretariat (Bag Organisasi)
				31 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sekretariat (Bag Organisasi)
				32 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Sekretariat (Bag Organisasi)
				33 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Sekretariat (Bag Organisasi)
				34 Program koordinasi pembangunan daerah	Sekretariat (Bag.Probang)
				35 Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Set DPRD

No	Agenda Prioritas (Nawacita)	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintah	Program Prioritas	Perangkat Daerah
				36 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Denut
				37 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Densel
				38 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Densel
				39 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Dentim
				40 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Dentim
				41 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Denbar
				42 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kec. Denbar
			Bidang Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan	43 Program Pendidikan Kedinasan	BKPP
				44 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	BKPP
3	Membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerah	Infrastruktur	Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar		
			Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1 Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	BPBD
			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				3 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				4 Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				5 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Agenda Prioritas (Nawacita)	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintah	Program Prioritas	Perangkat Daerah
				6 Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				7 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				8 Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				9 Program Pengendalian Banjir	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				10 Program Perencanaan Tata Ruang	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
				11 Program Pemanfaatan Ruang	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
				12 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	13 Program Operasional Dan Pemeliharaan Lingkungan Dan Pemukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				14 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				15 Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
				16 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	BPBD

No	Agenda Prioritas (Nawacita)	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintah	Program Prioritas	Perangkat Daerah
				17 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	BPBD
			Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar		
			Perhubungan	1 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Dinas Perhubungan
				2 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Dinas Perhubungan
				3 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Dinas Perhubungan
				4 Program Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas	Dinas Perhubungan
				5 Program Peningkatan Kelaikan pengoperasian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan
				6 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kendaraan Tidak Bermotor	Dinas Perhubungan
			Lingkungan Hidup	7 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
				8 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
				9 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
				10 Program Pengembangan dan Pengelolaan Pertamanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
			Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	11 Program Tanggap Darurat Kebencanaan	BPBD

No	Agenda Prioritas (Nawacita)	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintah	Program Prioritas	Perangkat Daerah
		Lingkungan Hidup	Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar		
			Lingkungan Hidup	1 Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
				2 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
				3 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
				4 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
				5 Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
				6 Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
4	Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.	Reformasi birokrasi dan tata pemerintahan yang baik	Penunjang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah		
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Sekretariat (Bagian Hukum)
5	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia	Pendidikan	Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar		
			Pendidikan	1 Program Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan
				2 Program Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun	Dinas Pendidikan
				3 Program Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan
				4 Program Pendidikan Non Formal	Dinas Pendidikan

No	Agenda Prioritas (Nawacita)	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintah	Program Prioritas	Perangkat Daerah
				5 Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
				6 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Dinas Pendidikan
				7 Program Peningkatan Mutu dan Pembinaan Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan
			Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	8 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Dinas Pendidikan
			Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar		
			Perpustakaan	1 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Dinas Pendidikan
			Kebudayaan	2 Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Dinas Pendidikan
			Kepemudaan Dan Olahraga	3 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				4 Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Kesehatan	Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar		
			Kesehatan	1 Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan
				2 Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Dinas Kesehatan
				3 Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
				4 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Dinas Kesehatan
				5 Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
				6 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Dinas Kesehatan

No	Agenda Prioritas (Nawacita)	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintah	Program Prioritas	Perangkat Daerah
				7 Program Pengawasan Obat dan makanan	Dinas Kesehatan
				8 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Dinas Kesehatan
				9 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
				10 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Dinas Kesehatan
				11 Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya	Dinas Kesehatan
				12 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
				13 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita	Dinas Kesehatan
				14 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Dinas Kesehatan
				15 Program Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Dinas Kesehatan
				16 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak	Dinas Kesehatan
				17 Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	RSU.Wangaya
			Penunjang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah		
			Bidang Keuangan	1 Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Dinas Kesehatan
		Kesejahteraan	Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar		

No	Agenda Prioritas (Nawacita)	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintah	Program Prioritas	Perangkat Daerah
		Rakyat	Sosial	1 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komonitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Dinas Sosial
				2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial
				3 Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma	Dinas Sosial
				4 Program Pemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial
				5 Program Keluarga Harapan	Dinas Sosial
			Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar		
			Tenaga Kerja	1 Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
				2 Program Peningkatan Kesempatan kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
				3 Program perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
			Kearsipan	4 Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6 Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Dinas Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan

No	Agenda Prioritas (Nawacita)	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintah	Program Prioritas	Perangkat Daerah
					Perempuan dan Perlindungan Anak
				7 Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Dinas Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				8 Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Dinas Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				9 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Dinas Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	10 Program Keluarga Berencana	Dinas Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				11 Program Pelayanan kontrasepsi	Dinas Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				12 Program Kesehatan reproduksi remaja	Dinas Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan

No	Agenda Prioritas (Nawacita)	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintah	Program Prioritas	Perangkat Daerah
					Perlindungan Anak
				13 Program Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Dinas Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				14 Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Dinas Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				15 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Dinas Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				16 Program Pengembangan Model Operasional BKB - POSYANDU, PAUD	Dinas Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				17 Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Dinas Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Kreatifitas dan	Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar		

No	Agenda Prioritas (Nawacita)	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintah	Program Prioritas	Perangkat Daerah	
		Inovasi	Komunikasi Dan Informatika	1 Program kerjasama informasi dan media massa	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
			Penanaman Modal	2 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
				3 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
			Penunjang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah			
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
6	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional	Perekonomian	Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar			
			Tenaga Kerja	1 Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi	
				2 Program Peningkatan Kesempatan kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi	
				3 Program perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi	
		Kreatifitas dan inovasi	Urusan Pemerintah Pilihan			
			Pariwisata	1 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata	
				2 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata	
				3 Program Pengembangan Kemitraan	Dinas Pariwisata	
		Iklim investasi	Urusan Pemerintah Pilihan			

No	Agenda Prioritas (Nawacita)	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintah	Program Prioritas	Perangkat Daerah
		dan iklim usaha	Industri	1 Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Dinas Perindustrian, Ekonomi Kreatif dan Perdagangan
				2 Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Dinas Perindustrian, Ekonomi Kreatif dan Perdagangan
				3 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Dinas Perindustrian, Ekonomi Kreatif dan Perdagangan
				4 Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Dinas Perindustrian, Ekonomi Kreatif dan Perdagangan
			Perdagangan	5 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Dinas Perindustrian, Ekonomi Kreatif dan Perdagangan
				6 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Dinas Perindustrian, Ekonomi Kreatif dan Perdagangan
				7 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Dinas Perindustrian, Ekonomi Kreatif dan Perdagangan
7	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	Iklim investasi dan iklim usaha	Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar		
			Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	1 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				2 Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif UKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				3 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Agenda Prioritas (Nawacita)	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintah	Program Prioritas	Perangkat Daerah
				4 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				5 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Bagian Ekonomi
				6 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Bagian Ekonomi
				7 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Bagian Ekonomi
			Pangan	8 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Dinas Pertanian
				9 Program Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan
				10 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Bagian Ekonomi
				11 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Bagian Ekonomi
				12 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Bagian Ekonomi
				13 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Bagian Ekonomi
			Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	14 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Bagian Ekonomi
				15 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Bagian Ekonomi
			Penanaman Modal	16 Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Bagian Ekonomi

No	Agenda Prioritas (Nawacita)	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintah	Program Prioritas	Perangkat Daerah
				17 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Bagian Ekonomi
			Urusan Pemerintah Pilihan		
			Pertanian	1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Dinas Pertanian
				2 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Dinas Pertanian
				3 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Dinas Pertanian
				4 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Dinas Pertanian
				5 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan
				6 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan
				7 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan
				8 Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan
				9 Program Perencanaan Pembangunan Peternakan, Perikanan dan Kelautan	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan
			Kelautan Dan Perikanan	10 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan
				11 Program pengembangan budidaya perikanan	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan
				12 Program pengembangan perikanan tangkap	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan

No	Agenda Prioritas (Nawacita)	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintah	Program Prioritas	Perangkat Daerah
				13 Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan
			Penunjang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah		
			Bidang Keuangan	1 Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
				2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Bidang Perencanaan Pembangunan	3 Program Kerjasama Pembangunan	Bagian Ekonomi
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Badan Pendapatan Daerah
				5 Program Pengawasan dan Pengendalian Inflasi Daerah	Bagian Ekonomi
9	Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial	Kebudayaan	Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar		
			Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1 Program Pengembangan wawasan kebangsaan	Sekretariat (Bag.Kesra)
			Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar		
			Kebudayaan	1 Program Pengembangan nilai budaya	Sekretariat (Bag.Kesra)
				2 Program Pengelolaan keragaman budaya	Dinas Kebudayaan
				3 Program Pengembangan nilai budaya	Dinas Kebudayaan
				4 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Dinas Kebudayaan
			Kepemudaan Dan Olahraga	5 Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga	Sekretariat (Bag.Kesra)

No	Agenda Prioritas (Nawacita)	Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintah	Program Prioritas	Perangkat Daerah
			Persandian	6 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Sekretariat (Bag.Kesra)

BAB IV
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN

Substansi PPAS lebih mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari Perangkat Daerah terkait. PPAS juga menggambarkan pagu anggaran sementara di masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan program dan kegiatan.

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan disusun menurut prioritas program pada RKPD Kota Denpasar Tahun 2017 dengan pengarahannya per Perangkat Daerah sebagai berikut :

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

No.	Urusan/Perangkat Daerah	Jumlah
A	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar	396.797.594.591
I	Pendidikan	23.508.682.800
1	Dinas Pendidikan	23.489.162.300
2	Kecamatan Denpasar Timur	10.000.000
3	Kecamatan Denpasar Selatan	9.520.500
II	Kesehatan	126.432.645.830
1	Dinas Kesehatan	49.873.784.300
2	BLU RSUD Wangaya	74.909.000.000
3	Kecamatan Denpasar Barat	203.956.500
4	Kecamatan Denpasar Timur	528.000.000
5	Kecamatan Denpasar Selatan	275.008.250
6	Kecamatan Denpasar Utara	210.792.780
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	432.104.000
III	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	231.696.024.745
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	231.696.024.745
IV	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	7.409.433.000
1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	5.709.433.000

No.	Urusan/Perangkat Daerah	Jumlah
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.700.000.000
V	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.412.464.516
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	600.000.000
2	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	2.574.576.000
3	Satuan Polisi Pamong Praja	757.349.516
4	Bagian Pemerintahan	1.112.995.000
5	Kecamatan Denpasar Barat	51.680.000
6	Kecamatan Denpasar Timur	26.000.000
7	Kecamatan Denpasar Selatan	71.178.250
8	Kecamatan Denpasar Utara	218.685.750
VI	Sosial	2.338.343.700
1	Dinas Sosial	2.315.243.700
2	Kecamatan Denpasar Selatan	23.100.000
B	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar	120.384.917.623
I	Tenaga Kerja	1.299.425.150
1	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi	1.299.425.150
II	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.277.420.000
1	Dinas Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.200.923.000
2	Kecamatan Denpasar Timur	52.000.000
3	Kecamatan Denpasar Selatan	8.030.000
4	Kecamatan Denpasar Utara	16.467.000
III	Pangan	1.892.665.150
1	Bagian Perekonomian	512.476.400
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	38.460.000
3	Dinas Pertanian	1.341.728.750
IV	Pertanahan	534.412.246
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	376.643.800
2	Bagian Pemerintahan	157.768.446
V	Lingkungan Hidup	47.752.511.710
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	47.573.614.110

No.	Urusan/Perangkat Daerah	Jumlah
2	Kecamatan Denpasar Barat	147.712.600
3	Kecamatan Denpasar Selatan	31.185.000
VI	Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.096.787.113
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.010.383.278
2	Kecamatan Denpasar Barat	148.310.000
3	Kecamatan Denpasar Timur	200.000.000
4	Kecamatan Denpasar Selatan	458.573.500
5	Kecamatan Denpasar Utara	279.520.335
VII	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	7.615.749.022
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	400.000.000
2	Bagian Perekonomian	453.600.000
3	Kecamatan Denpasar Barat	496.188.800
4	Kecamatan Denpasar Timur	292.000.000
5	Kecamatan Denpasar Selatan	669.176.750
6	Kecamatan Denpasar Utara	372.784.480
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.931.998.992
VII	Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	2.514.752.850
1	Dinas Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.661.399.000
2	Kecamatan Denpasar Barat	140.300.000
3	Kecamatan Denpasar Timur	212.000.000
4	Kecamatan Denpasar Selatan	280.393.300
5	Kecamatan Denpasar Utara	220.660.550
VIII	Perhubungan	3.895.312.750
1	Dinas Perhubungan	3.895.312.750
IX	Komunikasi Dan Informatika	13.902.843.602
1	Bagian Humas dan Protokol	5.220.445.278
2	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	264.450.000
3	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	8.417.948.324
X	Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	4.125.319.500
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.089.194.500
2	Bagian Perekonomian	1.036.125.000
XI	Penanaman Modal	1.310.645.000
1	Bagian Perekonomian	561.950.000

No.	Urusan/Perangkat Daerah	Jumlah
2	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	748.695.000
XII	Kepemudaan Dan Olahraga	4.045.295.254
1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.416.315.900
2	Kecamatan Denpasar Barat	371.620.895
3	Kecamatan Denpasar Timur	440.460.903
4	Kecamatan Denpasar Selatan	1.291.157.836
5	Kecamatan Denpasar Utara	525.739.720
	Statistik	514.312.000
1	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	514.312.000
XII	Persandian	1.457.289.250
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	11.169.000
2	Bagian Program Pembangunan	536.710.150
3	Inspektorat	909.410.100
XIV	Kebudayaan	25.544.781.276
1	Dinas Kebudayaan	15.540.678.616
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	7.949.743.500
3	Kecamatan Denpasar Barat	237.096.000
4	Kecamatan Denpasar Timur	672.000.000
5	Kecamatan Denpasar Selatan	835.862.500
6	Kecamatan Denpasar Utara	309.400.660
XV	Perpustakaan	492.579.800
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	492.579.800
XVI	Kearsipan	112.815.950
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	112.815.950
C	Urusan Pemerintahan Pilihan	11.990.216.750
I	Kelautan Dan Perikanan	789.877.500
1	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	789.877.500
II	Pariwisata	4.526.372.500
1	Bagian Kerjasama	1.351.645.000
2	Dinas Pariwisata	3.174.727.500
III	Pertanian	2.949.075.250
1	Dinas Pertanian	1.013.689.250
2	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	1.935.386.000

No.	Urusan/Perangkat Daerah	Jumlah
IV	Perdagangan	1.997.743.500
1	Dinas Perindustrian, Ekonomi Kreatif dan Perdagangan	1.997.743.500
V	Industri	1.727.148.000
1	Dinas Perindustrian, Ekonomi Kreatif dan Perdagangan	1.727.148.000
D	Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah	276.354.854.930
I	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	262.230.596.096
1	Dinas Pendidikan	11.517.490.800
2	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3.835.508.540
3	Dinas Kesehatan	10.595.185.606
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.464.149.790
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.051.014.292
6	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3.221.507.400
7	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	3.662.013.830
8	Dinas Perhubungan	20.462.374.000
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	38.010.621.974
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.952.286.000
11	Dinas Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.015.557.104
12	Dinas Sosial	2.539.791.501
13	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi	3.835.508.540
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.612.913.000
15	Dinas Kebudayaan	2.878.163.300
16	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	1.300.783.800
17	Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah	3.221.888.567
18	Bagian Hukum	2.257.889.614
19	Bagian Perekonomian	435.848.600
20	Bagian Organisasi	613.085.245
21	Bagian Umum	13.439.666.500
22	Bagian Program Pembangunan	940.763.300
23	Bagian Humas dan Protokol	5.630.930.130
24	Bagian Pemerintahan	606.008.500
25	Bagian Kesejahteraan Rakyat	581.433.500
26	Bagian Kerjasama	654.921.310
27	Sekretariat DPRD	31.964.371.000
28	Badan Pendapatan Daerah	5.697.640.700

No.	Urusan/Perangkat Daerah	Jumlah
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	18.226.437.971
30	Inspektorat	1.808.206.998
31	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	1.966.527.500
32	Kecamatan Denpasar Barat	4.907.604.110
33	Kecamatan Denpasar Timur	5.529.101.700
34	Kecamatan Denpasar Selatan	8.094.815.364
35	Kecamatan Denpasar Utara	4.924.515.940
36	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	5.635.403.200
37	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.715.332.520
38	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.410.371.600
39	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	2.292.950.500
40	Dinas Pertanian	2.340.938.000
41	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	2.262.068.500
42	Dinas Pariwisata	3.841.897.250
43	Dinas Perindustrian, Ekonomi Kreatif dan Perdagangan	2.275.108.500
II	Bidang Perencanaan Pembangunan	6.561.006.708
1	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	5.796.736.268
2	Bagian Pemerintahan	182.700.000
3	Bagian Kerjasama	381.336.150
4	Kecamatan Denpasar Barat	37.092.340
5	Kecamatan Denpasar Timur	75.000.000
6	Kecamatan Denpasar Selatan	55.591.250
7	Kecamatan Denpasar Utara	32.550.700
III	Bidang Keuangan	6.436.874.576
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	34.618.500
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.810.667.776
3	Bagian Organisasi	140.000.000
4	Sekretariat DPRD	20.429.000
5	Badan Pendapatan Daerah	3.302.359.300
6	Kecamatan Denpasar Timur	7.000.000
7	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	121.800.000
IV	Bidang Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan	1.126.377.550
1	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	1.126.377.550
	TOTAL	805.527.583.895

TABEL 4.2
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2017

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dinas Pendidikan						35.006.653.100
	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan						23.489.162.300
	Program Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun						18.392.397.100
	Kegiatan :						
1	Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi (Olimpiade Sains Tingkat SD dan SMP	Siswa Tingkat SD dan SMP Kota Denpasar	200 orang		389.137.000		389.137.000
2	Penyelenggaraan Kejar Paket A Setara SD	Laporan Ujian Nasional Paket A setara SD	75 orang		38.748.000		38.748.000
3	Penyelenggaraan Kejar Paket B Setara SMP	ujian nasional paket B setara SMP	300 orang		64.355.250		64.355.250
4	Dana Bos Pendamping SD/SDLB dan SMP/SMPLB Negeri Kota Denpasar	Siswa SD dan SMP Negeri	85902 orang		15.407.526.000		15.407.526.000
5	Seleksi Pemberian Penghargaan kepada siswa, guru, guru pembina dan sekolah berprestasi tingkat SD dan SMP	Siswa, guru, guru pembina dan sekolah yang berprestasi th 2015	263 orang		215.605.500		215.605.500
6	Ujian Sekolah Dasar/Madrasah ibtidayah (SD/MI)	Siswa SD se Kota Denpasar	15.125 orang		323.205.800		323.205.800
7	Ujian Nasional Siswa SMP/MTS	Siswa SMP Kota Denpasar	14.500 orang		349.090.800		349.090.800
8	Pusat Layanan Autis Kota Denpasar	Anak berkebutuhan khusus/ASD dan masyarakat	100 orang		994.232.300	75.000.000	1.069.232.300
9	Workshop Penanganan Anak Autis di Pusat Layanan Autis	Tenaga di pusat layanan Autis Kota Denpasar, guru di sekolah inklusi dan lembaga atau centre	40 orang		141.948.400		141.948.400
10	Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai informasi pendidikan Dasar (Autis)	Tenaga di pusat layanan Autis Kota Denpasar, guru di sekolah inklusi dan lembaga atau centre	750 orang		142.873.550		142.873.550
11	Olympiade Sains Guru SD dan SMP	Guru SD dan SMP se Kota Denpasar	150 orang		250.674.500		250.674.500
	Program Pendidikan Non Formal						348.719.300
	Kegiatan :						
12	Pengembangan kurikulum, Bahan Ajar dan model Pembelajaran PNF	Lembaga penyelenggara Pendidikan kesetaraan	50 orang		46.394.000		46.394.000
13	Peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Kota Denpasar	Pendidik dan Tenaga kependidikan (PTK) PAUDNI se Kota Denpasar	76 orang		85.549.300		85.549.300
14	Diklat Berjenjang Pendidikan PAUD Kota Denpasar	Pendidik PAUD di Kota Denpasar	70 orang		79.724.400		79.724.400
15	Penyelenggaraan Seminar bagi Pendidik PAUD	Pendidik PAUD dan Masyarakat Kota Denpasar	400 orang		112.451.800		112.451.800
16	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	49 SKPD		24.599.800		24.599.800

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan						775.377.800
17	Kegiatan : Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru negeri dan swasta kota Denpasar	1500 guru		74.374.500		74.374.500
18	Ujian Pemantapan Siswa SMP/MTS Negeri dan Swasta	Siswa SMP se Kota Denpasar	14,500 orang		261.350.800		261.350.800
19	Ujian Pemantapan Siswa SD/MI Negeri dan Swasta	Siswa SD/MI se Kota Denpasar	15125 orang		295.980.800		295.980.800
20	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru	Guru TK, SD, SMP dan Pengawas sekolah Kota Denpasar	640 dokumen		143.671.700		143.671.700
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan						3.086.967.100
21	Kegiatan : Pelaksanaan kerjasama kelembagaan di bidang Pendidikan	Dinas Dikpora, UPT Dikpora Kota Denpasar, SD, SMP, SMA/SMK se Kota Denpasar	60 Sekolah 5 UPT		1.001.946.200		1.001.946.200
22	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB Online)	SD, SMP, SMA, SMK Kota Denpasar	12,000 siswa		342.654.700		342.654.700
23	Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Pintar	Siswa dan Masyarakat			1.054.178.000	322.100.000	1.376.278.000
24	Kreatifitas Rumah Pintar	Sekolah dan swasta, pendidikan formal, nonformal dan pendidikan informal kota Denpasar	40 Sekolah		366.088.200		366.088.200
	Program Peningkatan Mutu dan Pendidikan Dasar						885.701.000
25	Kegiatan : Seleksi Pemberian Beasiswa bagi Siswa Kurang Mampu (SD, SMP)	Siswa SD dan SMP kurang mampu kota Denpasar	660 orang		862.926.500		862.926.500
26	Penerimaan Siswa Baru SMP Luar Provinsi	Lulusan SD luar provinsi			22.774.500		22.774.500
	Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						11.517.490.800
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Disdikpora Kota Denpasar	100%	35.500.000	9.573.724.000		9.609.224.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						1.864.266.800
6	Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Disdikpora Kota Denpasar	100%		1.027.025.000	837.241.800	1.864.266.800
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kegiatan :						44.000.000

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan SDM	100%		44.000.000		44.000.000
	Dinas Kepemudaan, Ekonomi Kreatif dan Olahraga						5.251.824.440
	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Kepemudaan Dan Olahraga						1.416.315.900
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan						83.546.300
	Kegiatan :						
1	Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Mengikuti Lomba Gugus Depan Tingkat Kwarda Bali)	Gugus Depan Perwakilan Kota Denpasar	3 Gugus Depan		12.850.000		12.850.000
2	Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Jambore Kwardcab Denpasar)	SD, SMP se Kota Denpasar	650 orang		70.696.300		70.696.300
	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga						1.332.769.600
	Kegiatan :						
3	Kerjasama Peningkatan Olahragawan Berbakat dan Berprestasi	Pelajar se Kota Denpasar	900 orang		769.793.200		769.793.200
4	Porsenijar Kecamatan	Pelajar di 4 Kecamatan se Kota Denpasar	4 kontingen		562.976.400		562.976.400
	Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						3.835.508.540
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						975.608.540
	Kegiatan :						
5	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Disdikpora Kota Denpasar	100%	3.000.000	972.608.540		975.608.540
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						2.815.900.000
	Kegiatan :						
6	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Disdikpora Kota Denpasar	100%	3.000.000	1.835.700.000	977.200.000	2.815.900.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur						44.000.000
	Kegiatan :						
7	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan SDM	100%		44.000.000		44.000.000

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dinas Kesehatan						60.468.969.906
	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan						49.873.784.300
	Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan						3.686.118.200
1	Kegiatan : Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Tersedianya obat PKD, obat gigi PKD, perbekalan kesehatan PKD, obat penunjang, obat klinik praja, reagen laboratorium	100%	-	2.600.000.000	-	2.600.000.000
2	Peningkatan pemeratan obat dan perbekalan kesehatan	Terpenuhinya kebutuhan alat-alat kesehatan di Puskesmas Untuk pelayanan kes. Dasar	11 Pusk	-	6.118.200	1.080.000.000	1.086.118.200
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat						6.857.574.500
3	Kegiatan : Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya	Tertindakannya pelayanan JKN	100%	-	117.802.000	-	117.802.000
4	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	Terwujudnya pemeliharaan kesehatan jiwa, indera pengelihatan dan pendengaran, sekeha kesenian dan calon jemaah haji kota Denpasar	35 org, 11 laporan, 15 sekeha, 1 laporan	-	270.251.500	-	270.251.500
5	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya				54.944.500	4.445.055.500	4.500.000.000
6	Peningkatan kesehatan masyarakat	Terpilihnya juara untuk Tk. Kota Dps; Terpilihnya juara untuk mewakili kota ke tingkat Provinsi; Meningkatnya kesehatan masyarakat	12 sekolah, 3 sekolah, 11 puskesmas	-	601.767.000	72.000.000	673.767.000
7	Peningkatan Pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Terwujudnya pelayanan kegawatdaruratan yang profesional	330 kl	-	93.837.000	-	93.837.000
8	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan	Tercapainya pengawasan terhadap masyarakat yang potensial terpapar pestisida; Terkendalinya kepadatan vektor; Tercapainya pengawasan kualitas air bersih dan air minum; Terbina dan terawasi rumah yang memenuhi syarat kesehatan; Masyarakat tidak BAB sembarangan	50 sampel; 15 TPS; 400 sampel; 300 sampel; 90 sampel; 120 sampel; 43 Desa/Kelurahan; 43 Desa/Kelurahan	-	340.345.000	-	340.345.000

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Penyelenggaraan Penyehatan Tempat-Tempat Umum	Tercapainya pengawasan sanitasi hotel, kolam renang, lingkungan pasar, Pusk, Pustu RS, lingkungan pendidikan dasar dan TTU lainnya; Tercapainya pengelolaan sampah medis puskesmas	100%	-	812.572.000	49.000.000	861.572.000
	Program Pengawasan Obat dan Makanan Kegiatan :						27.410.000
10	Peningkatan Penyehatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Penjual dan produsen pangan produksi RT memahami tentang keamanan pangan; Pangan hasil produksi RT tidak mengandung bahan berbahaya	100%; 60%	-	27.410.000	-	27.410.000
	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Kegiatan :						173.901.300
11	Peningkatan promosi obat bahan alam Indonesia di dalam dan luar negeri	Pembinaan Batra, Bantuan tanaman obat	33 batra, 4 desa	-	173.901.300		173.901.300
	Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat Kegiatan :						1.068.174.000
12	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Terdistribusinya UKS kit, leaflet, poster dan benner; Terbinanya 20 sekolah UKS; Terlaksananya bintek sekretariat UKS Kecamatan; Terdistribusinya IMT anak sekolah tingkat TK, SD, SMP dan SMA/SMK	masyarakat sekolah TK,SD,SMP dan SMA/SMK; 20 sekolah; 4 kecamatan; 16 sekolah	-	400.982.500	15.000.000	415.982.500
13	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Pembinaan PHBS, Siaran Keliling, Informasi Kesehatan	1 tatanan, 50 kl,16 skl	-	562.191.500	40.000.000	602.191.500
14	Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan	Terwujudnya proses perijinan tenaga dan sarana kesehatan	100%	-	50.000.000		50.000.000
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat Kegiatan :						555.105.900
15	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, gangguan Akibat Kekurangan yodium GAKY, kurang vit A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya dan lainnya	Meningkatkan berat badan balita kurang gizi	90 orang	-	250.084.300	-	250.084.300
16	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Meningkatnya keluarga sadar gizi	24 balita	-	305.021.600	-	305.021.600
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat Kegiatan :						523.462.800

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	Penyelenggaraan Kota sehat di 4 Kecamatan	100%	-	385.314.000	-	385.314.000
18	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	Diperolehnya peringkat juara PSN dan Kebersihan Dusun/Lingkungan Tkt. Desa	4 Desa/Kelurahan	-	138.148.800	-	138.148.800
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular						25.349.068.216
	Kegiatan :						
19	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Pencegahan dan pemberantasan penyakit demam berdarah Dengue	100%	-	438.880.000	-	438.880.000
20	Pengadaan alat fogging dan bahan-baha foging			-	4.273.785.000	-	4.273.785.000
21	Pengadaan vaksin penyakit menular	Semua gigitan hewan penular rabies mendapat Vaksinasi Anti Rabies (VAR)	100%	-	1.399.274.100	-	1.399.274.100
22	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	Semua bayi, balita, ibu hamil dan Anak Sekolah mendapat Imunisasi	90%	-	3.893.156.273	-	3.893.156.273
23	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular			-	1.950.276.071	110.000.000	2.060.276.071
24	Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik	Pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang	100%	-	9.707.607.000	-	9.707.607.000
25	Peningkatan Surveilans epedemiologi dan penanggulangan wabah	Mencegah terjadinya wabah penyakit	90%	-	71.287.000	60.000.000	131.287.000
26	Peningkatan Komunikasi, informasi dan edukasi (KII)	Meningkatnya upaya pencegahan terhadap penyakit	90%	-	647.516.000	250.927.000	898.443.000
27	Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Tuberkulosa (TBC)	Cakupan penemuan penderita baru BTA(+)	70%	-	608.732.000	-	608.732.000
28	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS	Mencegah terjadinya penularan HIV dan AIDS dan meningkatkan upaya penanggulangan HIV dan AIDS	100%	-	1.937.627.772	-	1.937.627.772
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan						1.443.442.900
	Kegiatan :						
29	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Pemenuhan pelayanan standar kesehatan	11 puskesmas	-	1.443.442.900	-	1.443.442.900
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin						4.400.000
	Kegiatan :						
30	Pelayanan operasi katarak	Terwujudnya pelayanan operasi katarak bagi penduduk miskin	40 org	-	4.400.000	-	4.400.000
	Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya						418.711.400
	Kegiatan						

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
31	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	Pemenuhan sarana pengelolaan air limbah Puskesmas I densel	1 puskesmas		525.000	400.000.000	400.525.000
32	Pengadaan sarana dan prasarana posyandu			-	18.186.400	-	18.186.400
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan						8.045.011.434
	Kegiatan :						
33	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Terpenuhinya sarana prasarana untuk pelayanan kes. Bagi peserta JKN dan keluarganya di Puskesmas	11 puskesmas	-	7.324.178.734	720.832.700	8.045.011.434
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Dan Balita						144.747.600
	Kegiatan :						
34	Pelatihan dan pendidikan perawatan balita			-	144.747.600	-	144.747.600
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia						999.662.000
	Kegiatan :						
35	Pelayanan kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan lansia; Meningkatnya derajat kemandirian kelompok rawan/resti; Meningkatnya akses pelayanan kes. Terhadap masyarakat	194 sulinggih; 316 KK rawan/resti; 22 desa/kelurahan	-	833.414.000	-	833.414.000
36	Pelayanan pemeliharaan kesehatan (Lansia)	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Lansia; Dilaksanakannya penyegaran intelegensia lansia; Diberikannya obat-obatan untuk lansia	4 kecamatan; 50 orang; 1.500 orang	-	106.248.000	60.000.000	166.248.000
	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan						310.500.000
	Kegiatan :						
37	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga	Pengelola makanan memahami kesehatan makmin hasil industri RTPengelola tempat pengelola makanan memahami keamanan dan kesehatan makanan	60%	-	91.500.000	-	91.500.000
38	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant	Pengelola memahami ttg higiene sanitasi restaurant/rumah makan	400 lokasi	-	88.500.000	-	88.500.000
39	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan kantin sekolah	Pengelola kantin sekolah memahami tentang makanan yang sehat dan aman untuk dikonsumsi	65%	-	130.500.000	-	130.500.000

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak						266.494.050
40	Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak secara terpadu	Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan Ibu dan anak		-	67.887.000	6.000.000	73.887.000
41	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin dan bayi baru lahir	Menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan anak	1 kl	-	192.607.050		192.607.050
	Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						10.595.185.606
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						6.850.185.000
42	Kegiatan : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	15.000.000	6.835.185.000	-	6.850.185.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						3.518.500.600
43	Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	1 tahun	-	2.514.450.600	1.004.050.000	3.518.500.600
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						44.000.000
44	Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlatihnya SDM	100%		44.000.000		44.000.000
	Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						182.500.006
45	Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya data informasi kesehatan	1 laporan		182.500.006		182.500.006
	BLU RSUD Wangaya						74.909.000.000
	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan						74.909.000.000
	Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit						74.909.000.000
	Kegiatan :						

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit (APBD)	Meningkatkan mutu lembaga, sarana lingkungan dan pelayanan kesehatan dengan pendekatan paradigma sehat Meningkatkan mutu lembaga, sarana lingkungan dan pelayanan kesehatan dengan pendekatan paradigma sehat		-	-	11.000.000.000	11.000.000.000
2	Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit (BLUD)		11.367.212.000	50.774.353.000	1.767.435.000	63.909.000.000	
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							244.160.174.535
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							231.696.024.745
Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong							2.685.319.850
1	Kegiatan : Operasional dan Pemeliharaan Drainase di Kota Denpasar	Drainase Kota Denpasar	166 m	1.500.000	2.683.819.850	-	2.685.319.850
Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan							2.900.000.000
2	Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan - Operasional dan Pemeliharaan Jalan	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kota Denpasar	12.500 meter		2.900.000.000		2.900.000.000
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya							514.680.150
3	Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Di Kota Denpasar		1.500.000	513.180.150	-	514.680.150
Program Pengembangan dan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya							100.000.000
4	Kegiatan : Peningkatan Konservasi Air Tanah	Di Kota Denpasar		-	100.000.000	-	100.000.000
Program Pemanfaatan Ruang							445.682.000
1	Kegiatan : Koordinasi Pemecahan Masalah Pemanfaatan Ruang	Pemecahan masalah tata ruang	1 tahun	-	445.682.000	-	445.682.000
Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh							225.050.342.745

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Kegiatan : Pembangunan Pasar Badung	Terbangunnya pasar Badung pasca bencana kebakaran	1 tahun			224.421.752.745	224.421.752.745
3	Operasional sentral parkir	Sentral parkir Lumintang	1 tahun	-	628.590.000	-	628.590.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah							12.464.149.790
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							8.815.689.600
3	Kegiatan : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas PU Kota Dps	100%	16.800.000	8.798.889.600	-	8.815.689.600
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							3.548.460.190
4	Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas PU Kota Dps	100%	-	3.548.460.190	-	3.548.460.190
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							100.000.000
5	Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dinas PU Kota Dps	100%	-	100.000.000	-	100.000.000
Badan Penanggulangan Bencana Daerah							9.751.014.292
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							1.700.000.000
Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran							1.583.000.000
1	Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Sarpras penanggulangan bencana BPBD.	100%		483.000.000		483.000.000
2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Kendaraan operasional yang didayagunakan untuk penanganan bencana	100%		1.000.000.000		1.000.000.000
3	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Karyawan Pasar Tradisional Se Kota Denpasar	86 orang		100.000.000		100.000.000
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan							117.000.000
Kegiatan :							

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pasca Bencana	Beberapa lokasi pasca bencana yang perlu dimonitor dan dilaporkan untuk kajian dalam penanganan bencana	30 lokasi		117.000.000		117.000.000
	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						600.000.000
	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam						600.000.000
5	Kegiatan : Pengembangan Pusdalops Bencana (Crisis centre)	Sarana dan prasarana informasi darurat bencana alam di Kota Denpasar	1 unit		247.350.000		247.350.000
6	Fasilitasi Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	Meningkatnya kemampuan masyarakat desa/kelurahan dalam menghadapi bencana	2 Desa/Kelurahan		352.650.000		352.650.000
	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa						400.000.000
	Tanggap Darurat Kebencanaan						400.000.000
7	Kegiatan : Penanganan Tanggap Darurat	Anggota masyarakat Kota Denpasar yang terkena dampak bencana.	100%		400.000.000		400.000.000
	Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						7.051.014.292
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						5.658.870.442
8	Kegiatan : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Administrasi Perkantoran BPBD	12 bulan	3.000.000	5.655.870.442		5.658.870.442
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						1.348.143.850
9	Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur BPBD	12 bulan		1.348.143.850		1.348.143.850
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						44.000.000
10	Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pejabat dan Staf BPBD yang perlu ditingkatkan kemampuannya dalam penanganan bencana	30 orang		44.000.000		44.000.000

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan						8.930.940.400
	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						5.709.433.000
	Program Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan dan Permukiman						3.200.000.000
1	Kegiatan : Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan dan Permukiman	Kec. Denbar, Dentim , Densel, Denut	6.484 M1	-	3.200.000.000	-	3.200.000.000
	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan						2.509.433.000
2	Kegiatan : Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman berbasis masyarakat	Kec.Denbar, Dentim , Densel dan Denut	1215	-	2.509.433.000	-	2.509.433.000
	Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						3.221.507.400
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						2.193.825.200
4	Kegiatan : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	250.000	2.193.575.200	-	2.193.825.200
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						983.682.200
5	Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	-	973.682.200	10.000.000	983.682.200
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						44.000.000
6	Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlatihnya Sumber Daya Aparatur	4 OK	-	44.000.000	-	44.000.000
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan						9.973.062.098
	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Statistik						514.312.000

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Pengembangan Data/Informasi						514.312.000
1	Kegiatan : Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi	Tersedianya data / informasi Denpasar membangun dan SIPD	100%	153.102.000	-	-	153.102.000
2	Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Implementasi Modul Perencanaan pada SIPKD Pemerintah Kota Denpasar	Tersusunnya data perencanaan pembangunan daerah secara terpadu	100%	-	361.210.000	-	361.210.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah							3.662.013.830
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						2.451.053.830
3	Kegiatan : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100%	97.600.000	2.353.453.830	-	2.451.053.830
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						1.166.960.000
4	Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	-	825.460.000	341.500.000	1.166.960.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						44.000.000
5	Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlatihnya Sumber Daya Aparatur	4 OK	-	44.000.000		44.000.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan							5.796.736.268
	Program Kerjasama Pembangunan						784.650.000
6	Kegiatan : Koordinasi dalam Pemecahan Masalah - Masalah Daerah	Tersedianya data koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	100%	-	784.650.000	-	784.650.000
	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh						1.244.406.000
7	Kegiatan : Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (BKPRD)	Penataan Ruang Kota Denpasar yang Terkendali; Perda RDTR Kota Denpasar; Identifikasi RTH di 4 Kecamatan, Kajian Review RTRW; SDM yang memahami Penyelenggaraan Penataan Ruang	100%	-	1.244.406.000	-	1.244.406.000

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar						286.173.000
8	Kegiatan : Perencanaan Air Minum, Dainase dan Sanitasi Perkotaan	Tersedianya buku Hasil Review Studi ERHA; SSK; Buku Putih; dan Memorandum Program Sanitasi	100%	-	286.173.000	-	286.173.000
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah						984.905.146
9	Kegiatan : Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik (Forum SKPD & Konsultasi Publik)	Tersedianya program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah sebagai bahan MUSRENBANG thn 2018	100%	-	79.556.000	-	79.556.000
10	Penyusunan Rancangan RKPD	Tersedianya rancangan program prioritas RKPD tahun 2018 sebagai acuan penyusunan Renja SKPD	100%	-	53.725.000	-	53.725.000
11	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Tersedianya program dan kegiatan TA 2018 sebagai acuan penyusunan KUA PPAS tahun 2018	100%	-	327.487.500	-	327.487.500
12	Penetapan RKPD	Tersedianya RKPD sebagai acuan penyusunan RAPBD TA 2018	100%	-	35.659.000	-	35.659.000
13	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Tersedianya LKPJ Walikota untuk menunjang program Good Governance	100%	-	59.840.000	-	59.840.000
14	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Tersedianya data realisasi pembangunan daerah Kota Denpasar dalam kaitannya dengan capaian kinerja	100%	-	169.716.000	-	169.716.000
15	Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran Sementara	Tersedianya program dan kegiatan prioritas sbg acuan penyusunan RAPBD Kota Denpasar	100%	-	240.256.646	-	240.256.646
16	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Aparatur	Terkoordinasinya perencanaan pembangunan bidang pemerintahan aparatatur sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%	-	18.665.000	-	18.665.000
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi						541.982.822
17	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang terintegrasi dan sesuai RPJM, RKPd, Renstra dan renja Perangkat Daerah	100%	-	168.235.000	-	168.235.000
18	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pertanian	Tersedianya data perencanaan pembangunan pertanian	100%	-	209.642.000	-	209.642.000
19	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perikanan	Tersedianya data perencanaan pembangunan perikanan	100%	-	164.105.822	-	164.105.822

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Perencanaan Sosial dan Budaya						942.471.300
	Kegiatan :						
20	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya	Perencanaan pembangunan bidang sosbud yg terintegrasi dan sesuai RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja SKPD	100%	-	113.441.800	-	113.441.800
21	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Terkoordinasinya Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	100%	-	127.839.500	-	127.839.500
22	Penelitian Indeks Kebahagiaan di Kota Denpasar Bali Tahun 2016	Tersusunnya Buku Indek Kebahagiaan di Kota Denpasar (Indonesia-Inggris)	100%	-	701.190.000	-	701.190.000
	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam						1.012.148.000
	Kegiatan :						
23	Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Tersedianya Masterplan Persampahan dan Masterplan Pertamanan Kota Denpasar	100%	-	523.148.000	-	523.148.000
24	Koordinasi Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah	Terlaksananya koordinasi perencanaan Bidang Prasarana Wilayah; Buku Masterplan Pedestrian Kota Denpasar; Buku Review Masterplan Kawasan Lumintang	100%	-	489.000.000	-	489.000.000
Dinas Perhubungan							24.357.686.750
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Perhubungan							3.895.312.750
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ						-
	Kegiatan :						
1	Pengadaan dan Pemasangan RPPJ, Guardrail dan Warning Light serta Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat	Pemenuhan Keamanan dan ketertiban Lalu Lintas	100%	-	-	-	-
2	Operasional Lalu Lintas	Pemenuhan Fasilitas Lalu Lintas Yang Berfungsi dengan Baik	75%	-	-	-	-
3	Penyediaan Fasilitas Lalu Lintas	Pemenuhan Fasilitas Lalu Lintas Yang Berfungsi dengan Baik	1 Paket	-	-	-	-
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan						3.086.218.860
	Kegiatan :						
4	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	Terpenuhinya Perencanaan Peningkatan Fasilitas Terminal Barang	100%	-	144.673.000	-	144.673.000

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	Terpilihnya sopir angkutan teladan di kota Denpasar	6 Orang	-	-	-	-
6	Peran Serta Lomba Tertib Lalu Lintas Wahana Tata Nugraha	Meningkatkan Budaya Tertib dan Disiplin Berjalan Lintas	10%	-	-	-	-
7	Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Lebaran	Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelayanan angkutan lebaran	100%	-	-	-	-
8	Operasional Pelayanan Transportasi Darat	Peningkatan Program Transportasi Darat	25%	9.000.000	1.215.187.090	17.500.000	1.241.687.090
9	Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Natal, Denpasar Festival dan Tahun Baru	Terwujudnya keselamatan dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan	100%	-	-	-	-
10	Pelaksanaan Kompetisi Dokar Hias Kreatif	Terpilihnya Awak Kendaraan Dokar Rias	100%	-	-	-	-
11	Operasional Pelayanan Terminal Penumpang	Lancarnya pelayanan jasa angkutan penumpang	10%	-	449.150.000	-	449.150.000
12	Operasional Pelayanan UPT PKB	Lancarnya pelayanan Penguian	100%	-	713.049.000	-	713.049.000
13	Operasional Pelayanan Terminal Barang	Lancarnya pelayanan Terminal Barang	100%	-	537.659.770	-	537.659.770
14	Penyelenggaraan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Denpasar	Terwujudnya keselamatan dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan	100%	-	-	-	-
15	Bimbingan Teknis Bagi operator Angkutan Laut di Kota Denpasar	Laporan Hasil Penyuluhan Operator Angkutan laut	1 Lap	-	-	-	-
16	Peningkatan Program Aksi Keselamatan	Presentasi terbinanya siswa di Kota Denpasar	10%	-	-	-	-
Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan							-
Kegiatan :							-
17	Pengembangan Sistem ATCS	Peningkatan Kelancaran Lalu Lintas di Simpang dan Ruas Jalan	12%	-	-	-	-
Program Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas							809.093.890
Kegiatan :							-
18	Pengendalian Operasional Pengamanan dan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Meningkatkan Kuantitas Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	100%	141.600.000	615.493.890	52.000.000	809.093.890
19	Kajian Manajemen Rekayasa lalu Lintas di Kota Denpasar	Terpenuhnya Perencanaan Kajian dan Manajemen Rekayasa lalu Lintas di Kawasan Hayam Wuruk	100%	-	-	-	-
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor							-
Kegiatan :							-
20	Uji Petik Kendaraan Bermotor	Tercapainya peningkatan keselamatan dan keamanan berlalu-lintas	100%	-	-	-	-
21	Pembinaan dan Pengawasan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor	Laporan Pembinaan dan Pengawasan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor	100%	-	-	-	-

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
22	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Tercapainya kualitas dan kuantitas wajib uji kendaraan bermotor	100%	-	-	-	-
23	Operasional Pelayanan Mobil Pengujian Kendaraan Bermotor Keliling	Terciptanya kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pengujian kendaraan bermotor.	100%	-	-	-	-
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kendaraan Tidak Bermotor							
Kegiatan :							
24	Optimalisasi Kegiatan Car Free Day di Kota Denpasar	Kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan lalu lintas baik pengguna lalu lintas maupun masyarakat pada umumnya	100%	-	-	-	-
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah							20.462.374.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
Kegiatan :							
25	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya pelayanan kantor	100%	3.000.000	18.397.000.000	-	18.400.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
Kegiatan :							
26	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	-	2.018.374.000	-	2.018.374.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
Kegiatan :							
27	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Kompetensi Pegawai	25%	-	44.000.000	-	44.000.000
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan							85.584.236.084
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup							
							47.573.614.110
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup							
Kegiatan :							
							380.656.070

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Koordinasi penilaian kota sehat/adipura	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	92%	-	32.580.000	-	32.580.000
2	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	92%	-	108.468.570	-	108.468.570
3	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	92%	-	29.270.000	-	29.270.000
4	Pengelolaan B3 dan limbah B3	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	92%	-	54.719.500	-	54.719.500
5	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	92%	-	63.105.000	-	63.105.000
6	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian Lingkungan Hidup	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	92%	-	46.523.000	-	46.523.000
7	Pengendalian dan pengawasan implementasi dokumen lingkungan	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	92%	-	45.990.000	-	45.990.000
Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam							400.402.170
Kegiatan :							
8	Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam	93%	-	53.749.070	-	53.749.070
9	Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam	93%	-	108.468.600	-	108.468.600
10	Kegiatan Peningkatan Peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	Pemenuhan kegiatan perlindungan dan konservasi SDA	100%	-	238.184.500	-	238.184.500
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan							32.930.726.030
Kegiatan :							
11	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Pemenuhan kebutuhan pengelolaan persampahan	12 bulan	-	30.095.765.420	-	30.095.765.420
10	Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan (Composting)	Pemenuhan pengurangan sampah	100%	-	641.961.480	-	641.961.480
11	Peningkatan Peran Serta masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Pemenuhan peningkatan pengelolaan persampahan	100%	12.800.000	409.367.000	-	422.167.000
12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya evaluasi pelaksanaan pengelolaan persampahan	100%	-	1.770.832.130	-	1.770.832.130
Program Pengembangan dan Pengelolaan Pertamanan							13.861.829.840

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Kegiatan : Penataan Taman	Pemenuhan penataan taman di Kota Denpasar	100%	-	1.483.046.500	-	1.483.046.500
14	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Lampu Taman/Hias di Kota Denpasar	Pemenuhan pemeliharaan LPJU	100%	-	12.378.783.340	-	12.378.783.340
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah							38.010.621.974
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							36.403.787.074
15	Kegiatan : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	100%	13.800.000	36.374.987.074	15.000.000	36.403.787.074
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							1.562.834.900
16	Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	100%	10.800.000	1.546.334.900	5.700.000	1.562.834.900
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							44.000.000
17	Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	100%	-	44.000.000	-	44.000.000
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							3.962.669.278
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Kependudukan Dan Pencatatan Sipil							1.010.383.278
Program Penataan Administrasi Kependudukan							1.010.383.278
1	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan dan Capil	Memantapkan pelayanan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	100%		259.725.000		259.725.000
2	Sosialisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	Memantapkan pelayanan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1 Laporan		64.610.000		64.610.000
3	Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan	Memantapkan pelayanan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	8 Desa / Kelurahan Terbaik		135.105.000		135.105.000

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Pengolahan dan Pengarsipan Data Catatan Sipil	Meningkatkan pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan	100%		69.895.000		69.895.000
5	Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendetang	Penduduk Pendetang di Kota Denpasar	100%		50.000.000		50.000.000
6	Pelaksanaan E-KTP di Kota Denpasar	Meningkatkan pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan	108.799 ktp		250.000.000		250.000.000
7	Pembuatan Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	Meningkatnya keserasian kebijakan kependudukan dalam rangka peningkatan kualitas, pengendalian pertumbuhan dan kuantitas pengarahannya mobilitas dan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan	100%		113.570.000		113.570.000
8	Evaluasi Pencapaian SPM	Meningkatkan pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan	100%		21.258.278		21.258.278
9	Penyusunan Sistem Informasi Teknologi Pelayanan Publik	Meningkatnya pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan	100%		26.220.000	20.000.000	46.220.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah							2.952.286.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							1.961.336.000
10	Kegiatan : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	3.000.000	1.958.336.000		1.961.336.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							946.950.000
11	Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%		643.200.000	303.750.000	946.950.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							44.000.000
12	Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%		44.000.000		44.000.000
Dinas Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							4.877.879.104

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						1.200.923.000
	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan						132.360.000
	Kegiatan :						
1	Sosialisasi Perumusan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Masyarakat, LSM, Pengajar	4 Kecamatan		45.260.000		45.260.000
2	Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran Serta Posisi Perempuan di bidang Politik dan Jabatan Publik	Masyarakat, LSM, Pengajar	30 orang		14.050.000		14.050.000
3	Frekuensi pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Masyarakat, LSM, Pengajar	4 Kecamatan		20.050.000		20.050.000
4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Masyarakat, LSM, Pengajar	1 laporan		53.000.000		53.000.000
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak						834.988.000
	Kegiatan :						
5	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2A)	Lembaga ormas perempuan di Kota Denpasar	4 Kecamatan		153.025.000		153.025.000
6	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Pelajar, Guru dan Masyarakat	4 Kecamatan		597.183.000		597.183.000
7	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Pelajar, Guru dan Masyarakat	3 Kali		61.480.000		61.480.000
8	Sosialisasi Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Anak (GN-AKSA)	Pelajar, Guru dan Masyarakat	100%		23.300.000		23.300.000
	Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan						233.575.000
	Kegiatan :						
9	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	Lembaga ormas perempuan di Kota Denpasar	8 kelompok		171.175.000		171.175.000
10	Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT	Prosentase penanganan kasus kasus KDRT dan Anak	4 Kecamatan		24.650.000		24.650.000
11	Penyusunan Profil Perlindungan dan perempuan lansia dan cacat	Tersedianya profil statistik gender	1 buah		37.750.000		37.750.000
	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana						1.661.399.000
	Program Keluarga Berencana						186.230.000
	Kegiatan :						

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin	Seluruh keluarga pra KS dan KS 1 di Kota Denpasar	200 Akseptor		41.600.000		41.600.000
13	Pelayanan KIE	Masyarakat, TOMA, TOGA, STT, Karang Taruna, PIK R/M	4 Kecamatan		128.450.000		128.450.000
14	Peningkatan Partisipasi Pria dalam KB/KR		4 Kecamatan		16.180.000		16.180.000
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja Kegiatan :						156.300.000
15	Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja	Siswa SMP Kota Denpasar	600 Orang		82.200.000		82.200.000
16	Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat	Mitra kerja (LSM, Karang Taruna, Kelompok Remaja, STT)	4 Kecamatan		74.100.000		74.100.000
	Program Pelayanan Kontrasepsi Kegiatan :						64.710.000
17	Pelayanan Konseling KB	Petugas KB se Kota Denpasar	70 KKB		64.710.000		64.710.000
	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri Kegiatan :						494.719.000
18	Operasional kelompok masyarakat peduli KB	Fasilitator KB (PPKBD dan Sub PPKBD)	4 Kecamatan		182.275.000		182.275.000
19	Koordinasi Pengelolaan Program	Ka. UPT KB, PKB/PLKB, Faskes, dan Jejaring KB	65 Orang		7.856.000		7.856.000
20	Pengelolaan Data dan Informasi Program KB		43 Desa/Lurah		260.468.000		260.468.000
21	Peningkatan kualitas data dan kemampuan pengelola data dan informasi program KKBPK	Ka. UPT KB, PKB/PLKB, Faskes, dan Jejaring KB	2 Laporan		44.120.000		44.120.000
	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR Kegiatan :						198.985.000
22	Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	SMP, SMA/SMK, Pembina dan Pengelola PIK R/M	18 PIK - RM		198.985.000		198.985.000
	Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Kegiatan :						349.190.000
23	Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Tumbuh kembang anak se Kecamatan Kota Denpasar	85 Orang		349.190.000		349.190.000
	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Kegiatan :						154.425.000

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di Kecamatan	Kelompok Tri Bina (BKB, BKR, BKL) berdampingan dengan UPPKS dan keluarga harmonis di Kecamatan se Kota Denpasar	4 Kecamatan		154.425.000		154.425.000
	Program Pengembangan Model Operasional BKB - POSYANDU, PAUD						56.840.000
25	Kegiatan : Pengkajian pengembangan model operasional BKB - Posyandu - PAUD	Bina Keluarga Balita (BKB), Posyandu dan PAUD di Kota Denpasar	4 Kecamatan (satu Kali)		56.840.000		56.840.000
	Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						2.015.557.104
26	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	100%		1.344.237.104		1.344.237.104
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						627.320.000
27	Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	100%	-	627.320.000	-	627.320.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						44.000.000
28	Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	100%		44.000.000		44.000.000
	Dinas Sosial						4.855.035.201
	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Sosial						2.315.243.700
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komonitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya						247.142.000
1	Kegiatan : Pelatihan Bagi Ketrampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin	Keluarga Miskin di Kota Denpasar	50 kk		187.182.000		187.182.000

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Pemberdayaan Fakir Miskin (PKH)	Fakir Miskin Kota Denpasar			59.960.000		59.960.000
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial						729.892.750
	Kegiatan :						
3	Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak (Pembinaan, Penanggulangan dan Pemulangan Gepeng dan WTS)		120 orang		363.300.500		363.300.500
4	Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		60 Buku		160.045.250		160.045.250
5	Penanganan Masalah - Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Dadrurat dan Kejadian Luar Biasa		30 TAGANA		43.367.250		43.367.250
6	Penyusunan Program Perencanaan Berbagai Pelayanan di Bidang Sosial dan Tenaga Kerja		4 Dokumen		114.136.250		114.136.250
7	Penerapan Sistem dan Informasi Pendataan di Bidang Sosial dan Tenaga Kerja		75 Buku		49.043.500		49.043.500
	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma						189.376.500
	Kegiatan :						
8	Pendayagunaan para Penyandang Cacat Eks Trauma (Utsawa Dharmagita Penyandang Cacat)		81 Orang		189.376.500		189.376.500
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial						1.148.832.450
	Kegiatan :						
9	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha (HALUN,HAN, dan FK- PANTI)		300 Anak		70.391.000		70.391.000
10	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat		1 IK-PSM		95.158.000		95.158.000
11	Pembinaan Karang Taruna		9 KT		194.177.500		194.177.500
12	Pemberdayaan PWS Kota Denpasar	Organisasi Sosial	1 ORSOS		105.372.000		105.372.000
13	Pemberdayaan PWRI Kota Denpasar	Organisasi Sosial	1 ORSOS		109.378.000		109.378.000
14	Pemberdayaan KKKS Kota Denpasar	Organisasi Sosial	1 ORSOS		104.117.000		104.117.000
15	Pemberdayaan LVRI Kota Denpasar	Organisasi Sosial	170 Orang		51.288.250		51.288.250
16	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha (Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional , HALUN)		500 Orang Lansia		326.932.000		326.932.000
17	Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaan di Bidang Sosial dan Tenaga Kerja		2 SPM	-	46.493.000		46.493.000
18	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Bidang Sosial dan Tenaga Kerja		2 Laporan	-	45.525.700		45.525.700

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						2.539.791.501
12	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan Administrasi perkantoran	1 tahun	1.500.000	1.720.268.301		1.721.768.301 1.721.768.301
13	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	1 tahun		788.023.200		788.023.200 788.023.200
14	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur	3 orang		30.000.000		30.000.000 30.000.000
	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi						5.134.933.690
	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Tenaga Kerja						1.299.425.150
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Kegiatan :						277.873.700
1	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja	Denpasar	75 orang		188.773.000		188.773.000
2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	Pencari kerja di Kota Denpasar	30 LPKS		29.667.700		29.667.700
3	Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	Denpasar	25 Buku		59.433.000		59.433.000
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja Kegiatan :						581.551.450
4	Penyusunan Informasi Pasar Kerja	Denpasar	300 Buku/20 Perusahaan		52.428.500		52.428.500
5	Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja	Denpasar	400 siswa		49.760.000		49.760.000
6	Peningkatan Kesempatan Kerja Bagi Pencari Kerja	Denpasar	300 Orang		329.395.000		329.395.000
7	Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan	Denpasar	50 Perusahaan		149.967.950		149.967.950

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan						440.000.000
	Kegiatan :						
8	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Pengusaha, Pekerja dan Pemerintah dalam Hubungan Industrial	40 Kasus		23.601.300		23.601.300
9	Fasilitas Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial	Pengusaha, Pekerja dan Pemerintah dalam Hubungan Industrial	KHL, UMK		252.232.200		252.232.200
10	Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan	Pengusaha, Pekerja dan Pemerintah dalam Hubungan Industrial	60 Perusahaan		71.112.500		71.112.500
11	Inovasi Program (Peringatan Hari Buruh Internasional/May Day)	Pengusaha, Pekerja dan Pemerintah dalam Hubungan Industrial	50 Perusahaan		93.054.000		93.054.000
	Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						3.835.508.540
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						975.608.540
	Kegiatan :						
12	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Disdikpora Kota Denpasar	100%	3.000.000	972.608.540		975.608.540
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						2.815.900.000
	Kegiatan :						
13	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Disdikpora Kota Denpasar	100%	3.000.000	1.835.700.000	977.200.000	2.815.900.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur						44.000.000
	Kegiatan :						
14	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan SDM	100%		44.000.000		44.000.000
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						4.736.726.000
	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah						3.089.194.500
	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif						395.217.000
	Kegiatan :						
1	Fasilitasi Peningkatan Pengembangan Usaha Kecil Menengah	UKM	77 UKM		395.217.000		395.217.000
	Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif UKM						793.625.000

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Kegiatan : Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	UKM	77 UKM		216.640.000		216.640.000
3	Pelatihan Penyelenggaraan Kewirausahaan	UKM	30 UKM		171.368.000		171.368.000
4	Pelatihan Achievement Motivation bagi pimpinan koperasi	Koperasi	30 Kop		405.617.000		405.617.000
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah						244.775.000
5	Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	UKM	4 UKM		244.775.000		244.775.000
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi						1.655.577.500
6	Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Koperasi	60 kop		163.057.600		163.057.600
7	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Koperasi	120 Kop	1.000.000	359.163.000		360.163.000
8	Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerja Sama Koperasi	Koperasi	4 Kop		307.964.000		307.964.000
9	Penyelenggaraan Hari Koperasi	Koperasi	1000 kop		198.575.900		198.575.900
10	Penilaian Kesehatan Usaha Koperasi online	Koperasi	150 Kop	56.250.000	51.407.800		107.657.800
11	Sertifikasi Kompetensi Pengelola Koperasi	Koperasi	80 Kop		248.076.000		248.076.000
12	Diklat prinsip - prinsip pemahaman tentang perkoperasian	Koperasi	30 kop		59.890.000		59.890.000
13	Pembentukan Holding Koperasi di Kota Denpasar	Koperasi	1 Lap		210.193.200		210.193.200
	Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						1.612.913.000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						1.072.413.000
14	Kegiatan : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan Administrasi perkantoran	100%	3.000.000	1.069.413.000		1.072.413.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						496.500.000
15	Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%		402.500.000	94.000.000	496.500.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						44.000.000

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur	4 PNS		44.000.000		44.000.000
	Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Keuangan						34.618.500
17	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Kegiatan : Kegiatan Penyusunan laporan dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Aparatur	1 Lap		34.618.500		34.618.500
	Dinas Kebudayaan						18.418.841.916
	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Kebudayaan						15.540.678.616
1	Program Pengembangan Nilai Budaya Kegiatan : Pelestarian dan aktualisasi seni budaya daerah	Pelestarian dan pengembangan budaya	- Pelaksanaan pentas budaya dan workshop sanggar/sekaa se-kota Denpasar, Pelaksanaan pelatihan tabuh, rebab, suling dan makendang, pelaksanaan pementasan tabuh, rebab, suling dan makendang, Pelaksanaan lomba tari bali		400.000.000		400.000.000
5	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	Pelestarian dan pengembangan budaya	Pelaksanaan pemberian penghargaan seni kerti budaya, parama budaya dan sanggar		300.000.000		300.000.000
6	Penyelenggaraan kreativitas budaya	Pelestarian dan pengembangan budaya	Pelaksanaan lomba ngelawar, sate renteng dan meprani, Pelaksanaan lomba tari legong keraton		375.000.000		375.000.000

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	Pelestarian dan pengembangan budaya	Pelaksanaan pembinaan, pelatihan dan pementasan dalang		380.000.000		380.000.000
8	Pelaksanaan pengembangan nilai budaya (Ngelingan Rerainan Sane Utama)	Pelestarian dan pengembangan budaya	Pelaksanaan pementasan dalam rangka upacara agama		100.000.000		100.000.000
9	Pengembangan kreativitas seni budaya daerah (HUT KOTA)	Pelestarian dan pengembangan budaya	Pelaksanaan pementasan kesenian dalam rangka memperingati HUT Kota Denpasar		150.000.000		150.000.000
10	Pembinaan dan Penataan Kelembagaan Subak Kota Denpasar	Pelestarian dan pengembangan budaya	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi subak di Kota Denpasar		1.943.000.000		1.943.000.000
11	Pembinaan penataan kelembagaan dan evaluasi desa pakraman	Pelestarian dan pengembangan budaya	Pelaksanaan Pembinaan Desa Pakraman		4.650.000.000		4.650.000.000
12	Pembinaan dan pelatihan seni rupa	Pelestarian dan pengembangan budaya	Pelaksanaan pelatihan dan pameran seni rupa		200.000.000		200.000.000
13	Pengembangan nilai budaya dan keagamaan	Pelestarian dan pengembangan budaya	Pelaksanaan parum sulinggih		2.300.000.000		2.300.000.000
14	Pengembangan kreatifitas seni tradisional di kota denpasar	Pelestarian dan pengembangan budaya	Pelaksanaan workshop layang-layang, permainan tradisional dan pahat		75.000.000		75.000.000
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya						1.407.678.616
	Kegiatan :						
15	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya kota denpasar	Pelestarian dan pengembangan budaya	Pelaksanaan Utsawa Dharma Gita tk. Kota denpasar dan tk. Nasional		600.000.000		600.000.000
16	Validasi data peninggalan sejarah purbakala	Pelestarian dan pengembangan budaya	Pelaksanaan validasi data peninggalan sejarah purbakala di Kota Denpasar		50.000.000		50.000.000
17	Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam	Pelestarian dan pengembangan budaya	Pelaksanaan penggandaan buku sastra keagamaan dan budaya		170.000.000		170.000.000
18	Denpasar Film Festival	Pelestarian dan pengembangan budaya	Pelaksanaan denpasar film festival		177.678.616		177.678.616

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Rekam budaya riset dan pendokumentasian pustaka seni dan budaya di Kota Denpasar	Pelestarian dan pengembangan budaya	Pelaksanaan pendokumentasian kegiatan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar		300.000.000		300.000.000
20	Kreatifitas seni tradisional di Kota Denpasar	Pelestarian dan pengembangan budaya	Pelaksanaan kreatifitas seni tradisional d kota denpasar		110.000.000		110.000.000
Program Pengelolaan Keragaman Budaya							3.260.000.000
Kegiatan :							
21	Pengembangan Kesenian dan kebudayaan daerah	Pelestarian dan pengembangan budaya	Pelaksanaan PKB Kota Denpasar dan mengikuti PKB tingkat Provinsi Bali		2.150.000.000		2.150.000.000
22	Penyelenggaraan dialog budaya	Peningkatan kualitas kehidupan beragama	Pelaksanaan kegiatan dialog Budaya, Rembug Sastra Purnama Badrawada, Rembug, Budaya Dipa Bhawana, Pelaksanaan Grebeg Aksara, Pelaksanaan Parum - Param		370.000.000		370.000.000
23	Fasilitasi Penyelenggaraan Keragaman Budaya Daerah	Peningkatan kualitas kehidupan beragama	Pelaksanaan musyawarah sabha upadesa (organisasi propesi tradisional)		250.000.000		250.000.000
24	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Pelestarian dan pengembangan budaya	Pelaksanaan seleksi ogoh-ogoh di masing-masing kecamatan		390.000.000		390.000.000
25	Lomba Kaligrafi & Bali Simbar	Pelestarian dan pengembangan budaya	Pelaksanaan lomba pembuatan kaligrafi dan bali simbar		100.000.000		100.000.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah							2.878.163.300
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							2.004.298.300
Kegiatan :							
26	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	3.000.000	2.001.298.300		2.004.298.300
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							813.865.000

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur		813.865.000		813.865.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						60.000.000
28	Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Jumlah Peserta Bimtek, pelatihan, kursus-kursus, seminar		60.000.000		60.000.000
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat							3.875.359.800
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							2.574.576.000
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan							1.647.321.000
	Kegiatan :						
1	Pengendalian kewanaman dan kenyamanan lingkungan WNA	Kota Denpasar	30 kali		137.265.000		137.265.000
2	Pengamanan Kawasan Sanur	Kawasan Sanur	4 laporan		147.000.000		147.000.000
3	Koordinasi Pengamanan Kota Denpasar	Kota Denpasar	12 laporan		247.500.000		247.500.000
4	Koordinasi Komunitas Intelijen Daerah Kota Denpasar	Kota Denpasar	12 laporan		736.500.000		736.500.000
5	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Kota Denpasar	4 laporan		178.550.000		178.550.000
6	Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Kota Denpasar	4 laporan		100.506.000		100.506.000
7	Sosialisasi Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik	Kota Denpasar	75 orang		100.000.000		100.000.000
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan							832.255.000
	Kegiatan :						
6	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	Kota Denpasar	12 bulan		310.366.000		310.366.000
7	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa melalui Upacara Bendera HUT Kota Denpasar	Kota Denpasar	1 kali		325.768.500		325.768.500
8	Peningkatan Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan	Kota Denpasar	2 kali		196.120.500		196.120.500

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Pendidikan Politik Masyarakat						95.000.000
7	Kegiatan : Verifikasi Bantuan Parpol	Kota Denpasar	7 partai politik		95.000.000		95.000.000
	Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						1.300.783.800
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						931.253.800
8	Kegiatan : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100%	6.000.000	925.253.800		931.253.800
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						347.530.000
9	Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana prasarana aparatur	100%		347.530.000		347.530.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						22.000.000
10	Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlatihnya SDM	2 OK		22.000.000		22.000.000
	Satuan Polisi Pamong Praja						3.979.238.083
	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						757.349.516
	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan						246.797.448
1	Kegiatan : Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (Pelatihan Linmas)	Kota Denpasar	100%	-	104.727.000	-	104.727.000
2	Pemantauan Upaya Perlindungan Masyarakat	Kota Denpasar	100%	-	35.895.900	-	35.895.900
3	Patroli Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Denpasar	100%	-	51.332.774	-	51.332.774
4	Pasukan Pengaman Kegiatan Pimpinan (Paspampin)	Kota Denpasar	100%	-	54.841.774	-	54.841.774
	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal						420.104.068
	Kegiatan :						

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Penertiban PKL, Pedagang Bermobil, Pedagang Acung, Pedagang Canang, Pedagang Bertenda di atas trotoar, Badan Jalan, taman, telajakan di Kota Denpasar	Kota Denpasar	100%	21.600.000	41.561.099	-	63.161.099
6	Penertiban Penduduk Liar, Gelandangan, Pengemis, Orang Gila, Orang Terlantar, Anak-anak punk dan Tuna Susila di Kota Denpasar	Kota Denpasar	100%	9.000.000	57.312.649	-	66.312.649
7	Peningkatan Tim Penegak Peraturan Daerah di Kota Denpasar.	Kota Denpasar	100%	18.000.000	141.276.376	-	159.276.376
8	Penertiban Baliho/ Spanduk Ucapan Selamat Hari Raya, Tahun Baru, Ulang Tahun Ormas yang sudah lewat tenggang waktunya dan melanggar Perda di Kota Denpasar	Kota Denpasar	100%	9.000.000	22.006.774	-	31.006.774
9	Peningkatan Tim Penegakan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok di Kota Denpasar	Kota Denpasar	100%	36.000.000	64.347.170	-	100.347.170
	Program Peningkatan Keamanan, Ketentraman, Dan Ketertiban						90.448.000
	Kegiatan :						
10	Penertiban dan Pembongkaran Reklame di Kota Denpasar.	Kota Denpasar	100%	-	90.448.000	-	90.448.000
	Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						3.221.888.567
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						1.769.199.043
	Kegiatan :						
11	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Satuan Polisi Pamong Praja Denpasar	100%	3.000.000	1.766.199.043	-	1.769.199.043
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						1.000.137.000
	Kegiatan :						
12	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Satuan Polisi Pamong Praja Denpasar	100%	-	946.937.000	53.200.000	1.000.137.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur						347.025.000
	Kegiatan :						
13	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Satuan Polisi Pamong Praja Denpasar	100%	-	347.025.000	-	347.025.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						44.000.000
	Kegiatan :						
14	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kota Denpasar	100%	-	44.000.000	-	44.000.000

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Program Peningkatan Nasionalisme Sumber Daya Aparatur Kegiatan : Hut Sat.Pol.PP	Kota Denpasar	100%	-	61.527.524	-	61.527.524
Sekretariat Daerah							
Bagian Hukum							2.257.889.614
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah							2.257.889.614
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan administrasi perkantoran pada Bagian Hukum	100%	3.000.000	89.839.000		92.839.000
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kompetensi Aparatur Yang Meningkatkan	100%	-	22.000.000	-	22.000.000
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan							2.143.050.614
3	Kegiatan : Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan (Koordinasi dan Konsultasi Penyelesaian Sengketa Hukum)	Koordinasi, Konsultasi dan jasa kuasa hukum	100%		784.878.000		784.878.000
4	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Disahkannya Perda Kota Denpasar yang teruji secara materil	100%	-	831.149.500	-	831.149.500
5	Publikasi Peraturan Perundang - undangan	Basis Data dan Peraturan Hukum Daerah Kota Denpasar	100%	-	527.023.114		527.023.114
Bagian Perekonomian							3.000.000.000
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pangan							512.476.400

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan						512.476.400
	Kegiatan :						
1	Pekan Nasional	Kelompok Tani dalam arti Luas	100%		443.403.400		443.403.400
2	Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Motivasi Pertanian	Kelompok Tani dalam arti Luas	100%		69.073.000		69.073.000
	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa						453.600.000
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan						453.600.000
	Kegiatan :						
3	Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	LPD se Kota Denpasar	100%		374.500.000		374.500.000
4	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	LPD se Kota Denpasar	100%	33.600.000	45.500.000		79.100.000
	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah						1.036.125.000
	Program pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah						1.036.125.000
	Kegiatan :						
5	Kegiatan Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal	Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan UMK	100%		308.000.000		308.000.000
6	Kegiatan Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Pelaku Usaha Mikro Kecil di Kota Denpasar	100%	52.350.000	675.775.000		728.125.000
	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Penanaman Modal						561.950.000
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi						459.650.000
	Kegiatan :						
7	Kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Perajin/Pengusaha Kecil di Kota Denpasar	100%		459.650.000		459.650.000
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi						102.300.000
	Kegiatan :						
8	Kegiatan Profil Daya Tarik dan Evaluasi Investasi	Penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri	100%		102.300.000		102.300.000
	Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						435.848.600

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bagian Perekonomian	100%	3.000.000	234.298.600	15.000.000	252.298.600 252.298.600
10	Program Pengawasan Dan Pengendalian Inflasi Daerah Kegiatan : Pengawasan dan Pengendalian Inflasi Daerah	Bagian Perekonomian	100%		183.550.000		183.550.000 183.550.000
Bagian Organisasi							753.085.245
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah							613.085.245
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Belanja Pegawai dan Belanja Pakai Habis untuk Menunjang Kelancaran Kegiatan	1 kegiatan	3.000.000	444.998.200	-	447.998.200 447.998.200
2	Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : Penyelenggaraan Inspeksi Mendadak dalam rangka Gerakan Disiplin Nasional (GDN) di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.	Jumlah Perangkat Daerah/Unit yang diinspeksi mendadak	43 SKPD/unit		29.487.045		29.487.045 29.487.045
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai pada Bagian Organisasi yang ikut diklat dan bimtek	2 orang	-	22.000.000	-	22.000.000 22.000.000
4	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kegiatan : Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kota Denpasar	Perda dan Perwali Penataan Organisasi Perangkat Daerah	1 Perda, 1 Perwali	-	113.600.000	-	113.600.000 113.600.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Keuangan							140.000.000

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.	Laporan Kinerja Pemerintah Kota Denpasar	1 Dokumen	-	140.000.000	-	140.000.000
Bagian Keuangan							1.009.909.500
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah							979.674.500
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	51.160.000	841.514.500	65.000.000	957.674.500
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya kompetensi SDM tentang administrasi	-	22.000.000	-	22.000.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Keuangan							30.235.000
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan : Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan dan semesteran	Terwujudnya laporan semesteran dan laporan bulanan realisasi APBD	100 buku laporan semesteran dan 120 buku laporan bulanan realisasi APBD	-	30.235.000	-	30.235.000
Bagian Umum							13.439.666.500

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						13.439.666.500
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						6.352.304.000
	Kegiatan :						
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya alat komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lancarnya operasional kantor	-	1.926.300.000	-	1.926.300.000
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan / perkantoran	Tersedianya administrasi keuangan / perkantoran	Lancarnya operasional perkantoran	-	3.361.655.450	-	3.361.655.450
3	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Lancarnya operasional kantor	-	133.646.600	-	133.646.600
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Lancarnya operasional kantor	-	74.241.950	-	74.241.950
5	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman	Lancarnya operasional kantor	-	856.460.000	-	856.460.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						7.051.362.500
	Kegiatan :						
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dnas/Operasional	Tersedianya perlengkapan kendaraan dinas / operasional	Lancarnya operasional kantor	-	2.862.082.500	-	2.862.082.500
7	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan	Tersedianya perlengkapan rumah jabatan	Lancarnya operasional kantor	-	52.800.000	-	52.800.000
8	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Lancarnya operasional kantor	-	2.893.200.000	205.000.000	3.098.200.000
9	Pemeliharaan rutin / berkala rumah jabatan dan gedung kantor	Terpenuhinya rumah jabatan Walikota dan Wakil Walikota serta Gedung Kantor	Lancarnya operasional kantor	-	290.400.000	-	290.400.000
10	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	Lancarnya operasional kantor	-	492.880.000	-	492.880.000
11	Pemeliharaan rutin / berkala meubelair	Tersedianya meubelair rumah jabatan dan gedung kantor	Lancarnya operasional kantor	-	58.000.000	-	58.000.000
12	Rehabilitasi sedang berat gedung kantor	Terciptanya gedung kantor yang layak pakai	Lancarnya operasional kantor	-	197.000.000	-	197.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						36.000.000
	Kegiatan :						
13	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tertelaksananya pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya kompetensi SDM tentang administrasi	-	36.000.000	-	36.000.000
	Bagian Program Pembangunan						1.477.473.450

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						940.763.300
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100%		369.170.800		369.170.800 369.170.800
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : Pengembangan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana e-Procurement	e-Procurement	1 tahun	1.000.000	476.937.500	8.000.000	485.937.500 485.937.500
	Program Koordinasi Pembangunan Daerah Kegiatan : Pembinaan Jasa Konstruksi	Bagian Program Pembangunan	1 kali		85.655.000		85.655.000 85.655.000
	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Persandian						536.710.150
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Kegiatan : 4 Pemantapan pelaksanaan pembangunan 5 Pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan 6 Evaluasi Kegiatan Pemantapan Pembangunan 7 Rapat Kerja Pemerintahan	Bagian Program Pembangunan Bagian Program Pembangunan Bagian Program Pembangunan Bagian Program Pembangunan	12 kali 48 kali 4 kali 1 kali		77.715.000 32.000.000 318.125.150 108.870.000		536.710.150 77.715.000 32.000.000 318.125.150 108.870.000
	Bagian Humas dan Protokol						10.851.375.408
	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Komunikasi Dan Informatika						5.220.445.278
	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi Kegiatan :						516.600.000

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pekan Informasi Pembangunan dan Peningkatan Wawasan SDM	Diketuainya informasi pembangunan daerah lain yang memiliki keunggulan tertentu dalam pelaksanaan dan pembangunan pemerintahan	1 kali	-	516.600.000	-	516.600.000
	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media						4.703.845.278
2	Kegiatan : Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Majalah	Tersebar nya informasi pembangunan pemerintah Kota Denpasar melalui majalah	Terbitnya 4000 eksemplar Majalah Sewaka Dharma	-	448.400.000	-	448.400.000
3	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Tersebar nya informasi pelaksanaan dan pembangunan pemerintah kota Denpasar melalui media massa cetak dan elektronik	1336 kali Publikasi di media massa	-	4.040.445.278	215.000.000	4.255.445.278
	Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						5.630.930.130
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						3.967.680.130
4	Kegiatan : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran	100% (Satu Cakupan)	3.000.000	3.919.942.990	-	3.922.942.990
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran	100% (Satu Cakupan)	-	44.737.140	-	44.737.140
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur						54.500.000
6	Kegiatan : Pengadaan Pakaian Kerja	Tersedianya pakaian kerja pegawai guna memberikan pelayanan dan citra positif Pemerintah Kota Denpasar	57 stell pakaian	-	54.500.000	-	54.500.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						22.000.000
7	Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal	Prosentase tercapainya peningkatan sarana dan prasarana	2 kali pelatihan	-	22.000.000	-	22.000.000
	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah						1.586.750.000
	Kegiatan :						

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Dialog / Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan / Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	Frekuensi menghadiri Bazar dan kegiatan masyarakat	- 50 kali bazaar di tempat - 1200 bazaar kupon Rp. 40.000 - 1140 bazaar kupon Rp. 50.000 - 1000 orang makanan dan minuman jamuan tamu tokoh masyarakat	-	705.000.000	-	705.000.000
9	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Lembaga Pemerintahan Non Departemen / Luar Negeri	Tertindaknya penerimaan kunjungan kerja Pejabat Negara / departemen / lembaga pemerintah non departemen / luar negeri	-2000 orang Jamuan tamu prasmanan VIP - 2000 orang Jamuan tamu prasmanan Biasa	-	881.750.000	-	881.750.000
Bagian Pemerintahan							2.059.471.946
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							1.112.995.000
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan							1.112.995.000
1	Kegiatan : peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	Kota Denpasar	2 Kali	-	1.112.995.000	-	1.112.995.000
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pertanahan							157.768.446
Program Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah							157.768.446
2	Kegiatan : Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Denbar,Dentim,Denut &Densel	10 Sertifikat	-	157.768.446	-	157.768.446
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah							606.008.500
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							488.118.500
Kegiatan :							

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bagian Pemerintahan	8 belanja	1.500.000	486.618.500	-	488.118.500
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						22.000.000
4	Kegiatan : Biaya Pendidikan dan Pelatihan Formal	Bagian Pemerintahan	2 orang	-	22.000.000	-	22.000.000
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah						95.890.000
5	Kegiatan : Koordinasi dalam Penyusunan LPPD Kota Denpasar	Kota Denpasar	1 laporan	-	95.890.000	-	95.890.000
	Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan						182.700.000
	Program Kerjasama Pembangunan						182.700.000
6	Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Apeksi Tahunan	2 Kota	2 Kota	-	182.700.000	-	182.700.000
	Bagian Kesejahteraan Rakyat						8.531.177.000
	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Kebudayaan						7.949.743.500
	Program Pengembangan Nilai Budaya						7.949.743.500
1	Kegiatan : Upakara Piodalan Keagamaan	Masyarakat Kota Denpasar	100%		5.173.898.500		5.173.898.500
2	Ngaturang Penganyar	Umat Hindu Kota Denpasar	100%		2.775.845.000		2.775.845.000
	Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						581.433.500
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						559.433.500
3	Kegiatan : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bagian Kesra Setda Kota Denpasar	100%	3.000.000	545.433.500	11.000.000	559.433.500

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						22.000.000
4	Kegiatan : Belanja Kursus, Pelatihan, sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	Staf Bagian Kesra Setda Kota Denpasar	100%		22.000.000		22.000.000
Bagian Kerjasama							2.387.902.460
Urusan Pemerintahan Pilihan Pariwisata							1.351.645.000
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata						1.224.155.000
1	Kegiatan : Pengembangan jaringan kerjasama luar Negeri	Terjalinya kerjasama luar Negeri/Penjajakan	2 kota	-	1.224.155.000	-	1.224.155.000
	Program Pengembangan Kemitraan						127.490.000
2	Kegiatan : Implementasi Kota Denpasar sebagai anggota tetap Organization of world Heritage cities (OWHC)	Terjalannya hubungan antar anggota dalam pembangunan	1 kali	-	127.490.000	-	127.490.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah							654.921.310
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						346.681.310
3	Kegiatan : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya administrasi perkantoran	12 bulan	-	346.681.310	-	346.681.310
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						22.000.000
4	Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	jumlah pegawai yang meningkat kemampuan dalam melaksanakan tugas	2 orang	-	22.000.000	-	22.000.000
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah						286.240.000
5	Kegiatan : Fasilitasi Koordinasi Kerjasama antar Daerah	Daerah yang diajak bekerjasama (Penjajakan)	2 kota/daerah	-	286.240.000	-	286.240.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan							381.336.150

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Kerjasama Pembangunan						381.336.150
6	Kegiatan : Koordinasi Kerjasama Pembangunan antar Daerah	jumlah hubungan antar anggota dalam pembangunan	2 kali	-	158.705.000	-	158.705.000
7	Fasilitasi Kerjasama dengan dunia usaha/lembaga dalam cooperate social responsibility (CSR)	Jumlah Peran Serta Dunia Usaha/ Lembaga Terhadap Tujuan Pembangunan	100%	-	222.631.150		222.631.150
Sekretariat DPRD							31.984.800.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah							31.964.371.000
	Pelayanan Administrasi Perkantoran						3.560.805.000
1	Kegiatan : Pelayanan Administrasi Perkantoran	DPRD dan Sekretariat	12 bulan	108.000.000	3.005.547.000		3.113.547.000
2	Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran Serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran	DPRD dan Sekretariat	6 dokumen		22.712.000		22.712.000
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	DPRD dan Sekretariat	9 dokumen		70.401.000		70.401.000
4	Pelayanan Humas dan Protokol	DPRD dan Sekretariat	6 dokumen		354.145.000		354.145.000
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						1.815.269.000
5	Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	DPRD dan Sekretariat	12 bulan		1.809.269.000	6.000.000	1.815.269.000
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						133.000.000
6	Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Sekretariat	13 orang		133.000.000		133.000.000
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah						26.455.297.000
7	Kegiatan : Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Pimpinan dan Anggota Pansus DPRD	32 kali		7.766.865.000		7.766.865.000
8	Hearing / Dialog dan Kordinasi dengan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama	Pimpinan dan Anggota DPRD	12 kali		25.310.000		25.310.000
9	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Pimpinan dan Anggota DPRD	104 kali		184.034.500		184.034.500
10	Rapat-Rapat Paripurna	Pimpinan dan Anggota DPRD	14 kali		500.540.000		500.540.000
11	Pelaksanaan Reses	Masyarakat Kota Denpasar	3 kali		2.991.200.000		2.991.200.000
12	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Pimpinan dan Anggota DPRD	19 kali		3.269.550.000		3.269.550.000

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Pimpinan dan Anggota DPRD	45 orang		1.193.800.000		1.193.800.000
14	Kunjungan Kerja Untuk Peningkatan Wawasan Alat Kelengkapan Dewan	Pimpinan dan Anggota DPRD	19 kali		9.965.850.000		9.965.850.000
15	Pelaksanaan Rapat Fraksi	Anggota Fraksi	5 fraksi		213.597.500		213.597.500
16	Pengadaan Pakaian Dinas DPRD	Pimpinan dan Anggota DPRD	45 orang		285.450.000		285.450.000
17	Penyelenggaraan Peringatan HUT Kota Denpasar	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 kali		59.100.000		59.100.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Keuangan							20.429.000
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan :							20.429.000
18	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sekretariat	3 dokumen		20.429.000		20.429.000
Badan Pendapatan Daerah							9.000.000.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah							5.697.640.700
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan :							3.610.498.700
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan Keperluan administrasi kantor	1 Tahun	65.000.000	3.545.498.700	-	3.610.498.700
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							2.012.142.000
Kegiatan :							
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya peralatan kantor untuk memperlancar tugas kantor	1 Tahun	6.000.000	1.774.642.000	231.500.000	2.012.142.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan :							75.000.000
3	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pegawai dan petugas pungut mendapat pengetahuan tugas-tugas dinas	1 Tahun	-	75.000.000	-	75.000.000

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Keuangan						3.302.359.300
	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah						3.302.359.300
	Kegiatan :						
4	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber - sumber Pendapatan Daerah	Tersedianya Pelaporan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan	20 aparatur 200 wp watermeter	-	3.623.500	395.000.000	398.623.500
5	Pelayanan PBB	Tersedianya Pelayanan PBB kepada Masyarakat	6.428 WP	-	393.710.500	-	393.710.500
6	Pemberian Kompensasi Pembayaran bagi Wajib Pajak yang Tanahnya ditetapkan sebagai Ruang Terbuka Hijau Kota dan Bagi Tanah Produktif yang diperuntukan untuk pertanian	Tersedianya pelaksanaan kompensasi pembayaran bagi wajib pajak di kawasan RTHK KDB 0 % dan di lahan Pertanian Produktif berupa Pembayaran PBB	4.919 WP	-	1.973.074.500	-	1.973.074.500
7	Pelayanan BPHTB	Tersedianya Pelayanan BPHTB kepada Masyarakat	8.236 Wp	-	13.150.800	-	13.150.800
8	Penyampaian Data dan Informasi sistem Pengelolaan Pajak Daerah (Pameran /promosi)	Tersedianya Pelaksanaan pameran tentang pelayanan pajak daerah	110 Orang	-	23.000.000	-	23.000.000
9	Penambahan Aplikasi Sistem Online	Tersedianya satu sistem Aplikasi Online	1 Sistem	-	200.000.000	-	200.000.000
10	Kajian nilai jual obyek Pajak (NJOP)	Tersedianya kajian obyek pajak Yang akurat	1 Kajian	-	-	-	-
11	Pendampingan, penghitungan dan penetapan target Pajak Daerah	Tersedianya kajian penentuan target yang efektif	1 laporan	-	-	-	-
12	Peremajaan Data Base Wajib pajak Daerah	Tersedianya Data Base	1 laporan	-	200.000.000	-	200.000.000
13	Kajian Pajak parkir	Tersedianya Pemenuhan perhitungan kajian potensi pajak parkir	1 Kajian	-	100.800.000	-	100.800.000
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah						20.415.009.047
	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pertanahan						376.643.800
	Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah						376.643.800
1	Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Mengurangi secara nyata praktek korupsi di birokrasi, dan dimulai dari tatanan (jajaran) pejabat yang paling atas.	100%	-	301.643.800	75.000.000	376.643.800

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Persandian						11.169.000
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH						11.169.000
2	Kegiatan : Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Tercapainya hasil tindak lanjut sesuai temuan	100%	-	11.169.000	-	11.169.000
	Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						18.226.437.971
17	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Mengurangi secara nyata praktek korupsi di birokrasi, dan dimulai dari tatanan (jajaran) pejabat yang paling atas.	100%	1.329.000.000	4.973.778.000	-	6.302.778.000 6.302.778.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						8.456.400.000
18	Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana prasarana aparatur	100%	3.000.000	1.908.200.000	1.105.200.000	3.016.400.000
19	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Terpenuhinya kendaraan operasional dinas	100%			5.440.000.000	5.440.000.000
20	Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	pakaian seragam dinas Pegawai Pemkot Denpasar beserta kelengkapannya	7.700 potong bahan	750.000	3.422.509.971	-	3.423.259.971 3.423.259.971
21	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal	Mengurangi secara nyata praktek korupsi di birokrasi, dan dimulai dari tatanan (jajaran) pejabat yang paling atas.	100%	-	44.000.000	-	44.000.000 44.000.000
	Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Keuangan						1.800.758.276

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah						1.800.758.276
22	Kegiatan : Penyusunan Standar Satuan Harga	Mengurangi secara nyata praktek korupsi di birokrasi, dan dimulai dari tatanan (jajaran) pejabat yang paling atas.	150 buku Standar Harga Tahun 2018 dan 100 buku RKBMD Tahun 2018	48.000.000	97.273.676	-	145.273.676
23	Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah	Mengurangi secara nyata praktek korupsi di birokrasi, dan dimulai dari tatanan (jajaran) pejabat yang paling atas.	100%	-	154.563.100	-	154.563.100
24	Penyusunan Rancangan Peraturan Tentang APBD	Terwujudnya Perda tentang APBD	200 buku perda tentang APBD	-	319.550.700	-	319.550.700
25	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Terwujudnya Perwali tentang penjabaran APBD	500 buku perwali tentang APBD	-	331.820.000	-	331.820.000
26	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Terwujudnya perda tentang perubahan APBD	200 perda tentang perubahan APBD	-	83.614.300	-	83.614.300
27	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Terwujudnya perwali tentang penjabaran perubahan APBD	500 buku perwali tentang perubahan APBD	-	3.374.000	-	3.374.000
28	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Terwujudnya perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	200 buku perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	-	207.585.000	-	207.585.000
29	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Terwujudnya perwali tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	200 buku perwali tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	-	137.334.000	-	137.334.000
30	Bimbingan teknis standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Accrual	Meningkatnya pengetahuan bendaharawan tentang SAP berbasis accrual	100%	-	70.726.000	-	70.726.000
31	Implementasi Sistem Keuangan Daerah	Terwujudnya penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD	45 SKPD	-	346.917.500	-	346.917.500
Inspektorat							2.717.617.098
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Persandian							909.410.100
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH							909.410.100
Kegiatan :							

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkot	24 LHP	210.000.000	25.743.600	-	235.743.600
2	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkot	12 LHP	140.000.000	14.667.200	-	154.667.200
3	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkot	2 Lap	210.000.000	22.092.800	-	232.092.800
4	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkot	1 Lap	246.960.000	31.008.000	-	277.968.000
5	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkot	1 Lap	-	8.938.500	-	8.938.500
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah							1.808.206.998
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							1.077.822.198
6	Kegiatan : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Aparatur Inspektorat	100%	7.200.000	1.070.622.198	-	1.077.822.198
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							557.520.000
7	Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Aparatur Inspektorat	100%	-	471.020.000	86.500.000	557.520.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							44.000.000
8	Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal	Aparatur Inspektorat	100%	-	44.000.000	-	44.000.000
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan							111.481.600
9	Kegiatan : Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Aparatur Inspektorat dan Perangkat Daerah	2 Lap	90.000.000	21.481.600	-	111.481.600
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan							17.383.200
10	Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Aparatur Inspektorat	1 Lap	-	17.383.200	-	17.383.200
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan							3.092.905.050

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						1.966.527.500
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase belanja pegawai dan barang pakai habis guna menunjang lancarnya operasional kantor	100%	43.300.000	1.335.546.000		1.378.846.000 1.378.846.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase belanja barang/jasa guna peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%		281.730.000	36.000.000	317.730.000 317.730.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Fungsional/Bintek, workshop	4 orang		44.000.000		269.951.500 44.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat dan ujian sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa	68 orang		225.951.500		225.951.500
	Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan						1.126.377.550
	Program Pendidikan Kedinasan Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS (Diklat Kepemimpinan Tk. II)	Jumlah Pejabat Eselon II yang mengikuti Dikla	5 orang		239.470.000		239.470.000 239.470.000
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kegiatan : Bimbingan Teknis Soft Skill Aparatur	Jumlah PNS di Lingkungan BKPP yang mengikuti Bintek	54 Orang		162.610.000		886.907.550 162.610.000
	Penyusunan, Penyajian, Informasi DUK, dan Pelaporan Mutasi Data Kepegawaian	Persentase akurasi Data ASN	100%		72.301.550		72.301.550
	Pengelolaan Administrasi Mutasi Kepegawaian	Jumlah Usulan SK Kenaikan Pangkat Pegawai yang di proses tepat waktu	783 Usulan Kenaikan Pangkat		99.240.500		99.240.500
	Pengelolaan Administrasi Pensiun PNS	Jumlah Usulan SK Pensiun Pegawai yang di proses tepat waktu	262 usulan		59.191.300		59.191.300

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Digitalisasi dan Penataan Arsip PNS	Jumlah File PNS dan penataan arsip PNS yang sudah terdigitalisasi	3000 berkas		91.341.000		91.341.000
11	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jumlah data Formasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	3 Formasi		313.391.300		313.391.300
12	Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi	Jumlah data Formasi Jabatan administrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	56 Formasi		31.956.300		31.956.300
13	Mutasi Dalam Jabatan Fungsional	Jumlah data Formasi Jabatan fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	250 Formasi		8.430.300		8.430.300
14	Pembinaan Kepegawaian	- Persentase Jumlah penyelesaian kasus Disiplin Pegawai - Jumlah pejabat yang mengikuti kegiatan Sosialisasi Penegakan disiplin dan Kode etik - Jumlah usulan Satya lencana Karya Satya yang diproses sesuai persyaratan	100% 60 orang 250 orang		48.445.300		48.445.300
Kecamatan Denpasar Barat							6.741.561.245
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah							4.907.604.110
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							3.994.402.910
1	Kegiatan : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya peralatan kantor	100%	3.000.000	3.991.402.910	-	3.994.402.910
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							869.201.200
2	Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan Sarana prasarana yg.berkwalitas	1 paket (100 %)	-	601.141.200	268.060.000	869.201.200
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							44.000.000
3	Kegiatan : Belanja Kursus,Pelatihan, Sosialisasi dan Bintek PNS	Terpenuhinya kapasitas sumber daya aparatur	4 orang	-	44.000.000	-	44.000.000

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan						37.092.340
4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan : Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Laporan Hasil Keluaran	100%	-	37.092.340	-	37.092.340
	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan						203.956.500
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan :						203.956.500
5	Pembinaan UKS	Terbinanya kelompok masyarakat	100%	-	10.040.000	-	10.040.000
6	Pembinaan Pokjanal DBD	Terlaksananya kegiatan kelompok kerja DBD	1	-	109.900.000	-	109.900.000
7	Lomba PSN	Berkurangnya sarang-sarang nyamuk	100%	4.400.000	79.616.500	-	84.016.500
	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						51.680.000
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kegiatan :						51.680.000
8	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai Luhur Budaya Bangsa	Laporan Kegiatan	1	-	51.680.000	-	51.680.000
	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup						147.712.600
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Kegiatan :						147.712.600
9	Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Laporan Kegiatan	100%	-	147.712.600	-	147.712.600
	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Kependudukan Dan Pencatatan Sipil						148.310.000
	Program Penataan Administrasi Kependudukan Kegiatan :						148.310.000
10	Pengendalian Mobilitas Keamanan dan Penertiban Penduduk	Terlaksananya Penertiban Penduduk yang tidak ber KTP	banjar-banjar di kec.Denbar	37.250.000	111.060.000	-	148.310.000

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa						496.188.800
	Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan						324.963.900
	Kegiatan :						
11	Pembinaan Administrasi PKK	Jumlah PKK yang terbina	100%	12.000.000	254.201.400	-	266.201.400
12	Pembinaan P2WKSS	Terlaksananya Pembinaan P2WKSS	1	-	11.491.000	-	11.491.000
13	Bunda PAUD	Laporan kegiatan	100%	-	35.819.500	-	35.819.500
14	Pembinaan UP2K	Terlaksananya Pembinaan UP2K	1	-	11.452.000	-	11.452.000
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa						171.224.900
	Kegiatan :						
15	Penyusunan Profil Kelurahan	Laporan Kegiatan	100%	49.800.000	42.330.000	-	92.130.000
16	Lomba Kelurahan	Laporan Kegiatan	1 kelurahan	-	36.186.000	-	36.186.000
17	Bulan Bakti Gotong Royong	Laporan Kegiatan	100%	-	42.908.900	-	42.908.900
	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana						140.300.000
	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi Dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat						105.790.000
	Kegiatan :						
18	Lomba Balita Sehat Indonesia	Jumlah LBSI yang terbina	100%	-	11.954.000	-	11.954.000
19	Pembinaan Posyandu	Pelaksanaan Posyandu	100%	-	90.121.000	-	90.121.000
20	Pembinaan GSI	Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat	1	-	3.715.000	-	3.715.000
	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS						34.510.000
	Kegiatan :						
21	Penanggulangan/pengecahan dan Pemberantasan Penyakit menular (HIV/AIDS)	Laporan Hasil kegiatan	1 laporan	-	34.510.000	-	34.510.000
	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Kepemudaan Dan Olahraga						371.620.895
	Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga						371.620.895
	Kegiatan :						
22	Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga Porkot	Laporan Kegiatan	100%	25.500.000	174.945.995	-	200.445.995
23	Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga Porkel	Laporan Kegiatan	100%	16.100.000	155.074.900	-	171.174.900

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Kebudayaan						237.096.000
	Program Pengembangan Nilai Budaya						237.096.000
	Kegiatan :						
24	Lomba UDG dan Pentas Budaya	Laporan Hasi Kegiatan	100%	-	131.875.000	-	131.875.000
25	Pelaksanaan Dhrama Shanti	Terpenuhinya pelestarian seni budaya daerah	100%	-	34.841.000	-	34.841.000
26	Pembinaan Sekeha Teruna	Jumlah Sekaha Teruna yang dibina	1	-	70.380.000	-	70.380.000
	Kecamatan Denpasar Timur						8.043.562.603
	Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						5.529.101.700
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						4.726.311.700
	Kegiatan :						
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	3.000.000	4.723.311.700		4.726.311.700
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						733.790.000
	Kegiatan :						
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Sarpras Aparatur	100%		545.440.000	188.350.000	733.790.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						44.000.000
	Kegiatan :						
3	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya kegiatan Bimtek bagi aparatur Kecamatan	100%		44.000.000		44.000.000
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik						25.000.000
	Kegiatan :						
4	Peningkatan Penilaian Masyarakat terhadap transparansi Informasi Pelayanan Kecamatan	Terlaksananya pelayanan publik secara prima	100%		25.000.000		25.000.000
	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan						10.000.000
	Program Pendidikan Anak Usia Dini						10.000.000

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini (Melalui BUNDA PAUD)	Terlaksananya publikasi dan sosialisasi PAUD	100%		10.000.000		10.000.000
	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan						528.000.000
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat						123.000.000
6	Peningkatan Kesehatan Masyarakat (UKS)	Terlaksananya Kegiatan UKS	100%		76.000.000		76.000.000
7	Peningkatan Kesehatan Masyarakat (POKJANAL DBD)	Terlaksananya Kegiatan POKJANAL DBD	100%		47.000.000		47.000.000
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular						405.000.000
8	Penyemprotan / Foging Sarang nyamuk	Terlaksananya kegiatan Foging di Kelurahan	100%		300.000.000		300.000.000
9	Pembrantasan sarang nyamuk dan Lomba PSN	Terlaksananya kegiatan PSN dan Lomba PSN	100%		105.000.000		105.000.000
	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						26.000.000
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan						26.000.000
10	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	Terlaksananya kegiatan Apel Hari Kemerdekaan	100%		26.000.000		26.000.000
	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						52.000.000
	Program Penguatan Kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak						52.000.000
11	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Terlaksananya kegiatan sosialisai tentang pengarusutamaan gender	100%		52.000.000		52.000.000
	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Kependudukan Dan Pencatatan Sipil						200.000.000
	Program Penataan Administrasi Kependudukan						200.000.000

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Pengendalian mobilitas Penduduk Pendetang	Terlaksananya kegiatan penertiban penduduk pendatang	100%		200.000.000		200.000.000
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa							292.000.000
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa							190.000.000
13	Pembinaan Perkembangan Desa/Kelurahan dan Profil Kecamatan / Kelurahan	Terlaksananya Pembinaan Perkembangan Desa/Kelurahan, Profil Kecamatan dan Kelurahan	100%		110.000.000		110.000.000
14	Bulan Bakti Gotong Royong LPM	Terlaksananya Bulan Bakti Gotong Royong LPM	100%		80.000.000		80.000.000
Program Peningkatan Peran perempuan di Perdesaan							102.000.000
15	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga(PKK)	Terlaksananya kegiatan PKK Kecamatan	100%		85.000.000		85.000.000
16	P2 WKSS dan UP2K	Terlaksananya Kegiatan P2WKSS dan UP2K	100%		17.000.000		17.000.000
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana							212.000.000
Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi Dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat							135.000.000
1	Penyuluhan Kesehatan Ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (GSI)	Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan dan pembinaan melalui Gerakan Sayang Ibu (GSI)	100%		13.000.000		13.000.000
2	Penyuluhan Kesehatan Ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan POSYANDU	Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan dan pembinaan melalui POSYANDU	100%		87.000.000		87.000.000
3	Penyuluhan Kesehatan Ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan (Lomba Balita Indonesia/LBI)	Terlaksananya Kegiatan pembinaan melalui LBI	100%		35.000.000		35.000.000
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS							77.000.000
1	Penyuluhan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV AIDS	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan Narkoba, HIV/AIDS	100%		77.000.000		77.000.000
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Kepemudaan Dan Olahraga							440.460.903

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga						440.460.903
1	Kompetisi Olah Raga (Porkel dan Porkot)	Terlaksananya Kegiatan PORDEL dan PORKOT	100%		440.460.903		440.460.903
	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Kebudayaan						672.000.000
	Program Pengembangan Nilai Budaya						672.000.000
1	Dharma Santi	Terlaksananya Kegiatan Dharma Santhi	100%		58.000.000		58.000.000
2	Lomba UDG dan Pentas Budaya	Terlaksananya Lomba UDG dan Pentas Budaya	100%		614.000.000		614.000.000
	Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan						75.000.000
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah						75.000.000
1	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Musrenbang Kecamatan	100%		75.000.000		75.000.000
	Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Keuangan						7.000.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						7.000.000
1	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya pembuatan laporan kinerja dan keuangan Kecamatan	100%		7.000.000		7.000.000
	Kecamatan Denpasar Selatan						12.103.592.500
	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan						9.520.500
	Program Pendidikan Anak Usia Dini Kegiatan :						9.520.500

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bunda PAUD	Meningkatnya Pendidikan Anak Usia Dini	1 PAUD/10 Desa/Kelurahan		9.520.500		9.520.500
1	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan						275.008.250
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat						49.841.000
1	Kegiatan : Pembinaan UKS	Terbinanya UKS Yang Ada DI Denpasar Selatan	4 Sekolah (10 Desa/Kelurahan)		49.841.000		49.841.000
	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular						225.167.250
1	Kegiatan : Pemusnahan/Karantina Sumber Penyebab Penyakit Menular (Lomba PSN)	Menurunnya Volume Penderita Demam Berdarah	10 Desa/Kelurahan		225.167.250		225.167.250
1	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						71.178.250
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan						30.987.000
1	Kegiatan : Pengendalian Keamanan Lingkungan	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Di Masyarakat	100%		30.987.000		30.987.000
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan						40.191.250
1	Kegiatan : Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Laporan Hasil Kegiatan	100%		40.191.250		40.191.250
1	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Sosial						23.100.000
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial						23.100.000
1	Kegiatan : Pembinaan P2WKSS	Tertindakannya Pembinaan P2WKSS	1 Desa Kelurahan/10 Desa/Kelurahan		11.550.000		11.550.000
2	Pembinaan UP2K	Tertindakannya Pembinaan UP2K	1 Desa Kelurahan/10 Desa/Kelurahan		11.550.000		11.550.000

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						8.030.000
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan						8.030.000
1	Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah (Pembinaan Gerakan Sayang Ibu/GSI)	Persentase Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Masyarakat	100%		8.030.000		8.030.000
1	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup						31.185.000
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah						31.185.000
1	Kegiatan : Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah	Terlaksananya Lomba Kebersihan Lingkungan	1 Lingkungan / 6 Kelurahan		31.185.000		31.185.000
1	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Kependudukan Dan Pencatatan Sipil						458.573.500
	Program Penataan Administrasi Kependudukan						458.573.500
1	Kegiatan : Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendetang	Terlaksananya Pengendalian Mobilitas Penduduk dan Penertiban	10 Desa/Kelurahan		458.573.500		458.573.500
1	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa						669.176.750
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa						333.960.000
1	Kegiatan : Monitoring Pelaporan Profil Kecamatan dan Kelurahan	Tersusunnya Profil Kecamatan dan Kelurahan	1 Kecamatan dan 6 Kelurahan		249.067.500		249.067.500
2	Bulan Bhakti Gotong Royong	Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong	6 Kelurahan		84.892.500		84.892.500
	Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan						335.216.750
1	Kegiatan : Pembinaan Administrasi PKK	Terlaksananya Pembinaan Administrasi PKK	6 Kelurahan		335.216.750		335.216.750

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana						280.393.300
	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi Dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat						208.279.500
	Kegiatan :						
1	Lomba Balita Indonesia (LBI)	Persentase Meningkatnya Kesehatan Ibu Bayi dan Anak	100%		19.544.250		19.544.250
2	Pembinaan Posyandu	Persentase Meningkatnya Kesehatan Ibu Bayi dan Anak	100%		188.735.250		188.735.250
	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS						72.113.800
	Kegiatan :						
1	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS	Menurunnya Persentase Penderita HIV/AIDS	100%		72.113.800		72.113.800
1	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Kepemudaan Dan Olahraga						1.291.157.836
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga						1.291.157.836
	Kegiatan :						
1	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga (PORKOT)	Terbinanya Bibit Atlet Untuk Ajang Kompetisi	6 Kelurahan		610.266.836		610.266.836
2	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga (PORKEL)	Terbinanya Bibit Atlet Untuk Ajang Kompetisi	6 Kelurahan		680.891.000		680.891.000
1	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Kebudayaan						835.862.500
	Program Pengembangan Nilai Budaya						835.862.500
	Kegiatan :						
1	Pembina Sekaa Teruna	Terbinanya Sekaa Teruna	1 Desa/Kelurahan (10 Desa/Kelurahan)		105.176.500		105.176.500
2	Dharma Shanti	Terlaksananya Kegiatan Dharma Shanti	1 Desa/Kelurahan (10 Desa/Kelurahan)		33.852.500		33.852.500
3	Pembinaan Desa Pekraman	Terlaksananya Pembinaan Desa Pekraman	1 Desa/Kelurahan (10 Desa/Kelurahan)		63.525.000		63.525.000
4	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah (Utsawa Dharma Gita)	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Pelestarian Adat Budaya Daerah	11 Desa Pekraman/ 10 Desa/Kelurahan		633.308.500		633.308.500

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						8.094.815.364
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah belanja pegawai dan barang pakai habis guna menunjang operasional Kelurahan dan Kecamatan Densel	100%	3.000.000	6.572.656.800		6.575.656.800 6.575.656.800
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah belanja barang/jasa guna peningkatan sarana dan prasarana	100%		781.677.564	670.150.000	1.451.827.564 1.451.827.564
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan fungsional/Bintek/Workshop bagi PNS Daerah	Meningkatkan Pelayanan Pada Masyarakat	4 orang		44.000.000		44.000.000 44.000.000
1	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	100%		23.331.000		23.331.000 23.331.000
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan						55.591.250
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan : Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Meningkatnya Persentase Pembangunan Daerah	150 Usulan		55.591.250		55.591.250 55.591.250
	Kecamatan Denpasar Utara						7.111.117.915
	Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						4.924.515.940
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						3.807.867.400

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Kegiatan : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya penyiapan sarana dan prasarana kantor yang memadai	2 belanja	35.500.000	3.772.367.400		3.807.867.400
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						1.072.648.540
3	Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya penyiapan sarana dan prasarana kantor yang memadai	2 belanja		715.122.000	357.526.540	1.072.648.540
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						44.000.000
4	Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan fungsional/Bintek/Workshop bagi PNS Daerah	Terpenuhinya kapasitas sumber daya aparatur	4 orang		44.000.000		44.000.000
1	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan						210.792.780
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular						175.229.780
1	Kegiatan : Pemusnahan/karantina Sumber Penyebab Penyakit Menular(Lomba PSN)	Tercapainya penanggulangan penyakit menular	2 kali/3 kelurahan		175.229.780		175.229.780
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat						35.563.000
1	Kegiatan : Pembinaan UKS	Tercapainya Kesehatan peningkatan masyarakat	4/3 UKS		35.563.000		35.563.000
1	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						218.685.750
	Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan						195.000.000
1	Kegiatan : Penunjang dan Pelatihan Kegiatan Satinmas	Tercapainya pemeliharaan lingkungan yang berkualitas	1 kali, 3 kelurahan		195.000.000		195.000.000
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan						23.685.750
1	Kegiatan : Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	Tercapainya rasa nasionalisme kebangsaan	100%		23.685.750		23.685.750

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						16.467.000
1	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Kegiatan : Penyuluhan Kesehatan Ibu Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat (GSI)	Tercapainya hasil lomba GSI	1 kali desa/ kelurahan		16.467.000		16.467.000
1	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Kependudukan Dan Pencatatan Sipil						279.520.335
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan Kegiatan : Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendetang	Pengendalian mobilitas penduduk	6 kali , 3 kelurahan		279.520.335		279.520.335
1	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa						372.784.480
1	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan Kegiatan : Pemerdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK),(P2WKSS) (UP2K)	Pemerdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK),(P2WKSS) (UP2K)	1/3 Kelurahan		327.923.200		327.923.200
1	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Kegiatan : Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Tercapainya profil kecamatan dan kelurahan yang baik	1 kecamatan / 3 kelurahan		44.861.280		44.861.280
1	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana						220.660.550
1	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS Kegiatan : Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS	Tertanggulangnya narkoba, penyakit sosial masyarakat termasuk HIV	1/3 keurahan		70.463.800		70.463.800
	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi Dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat						150.196.750

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kegiatan : Penyuluhan Kesehatan Ibu,Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	Tercapainya hasil lomba GSI	1 kali/desa/kelurahan		14.014.000		14.014.000
1	Lomba Balita Indonesia Penyuluhan Kesehatan Ibu,Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat (Posyandu)	Tercapainya posyandu yang berkualitas	1 kali		16.733.750 119.449.000		16.733.750 119.449.000
1	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Kepemudaan Dan Olahraga						525.739.720
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga						525.739.720
1	Kegiatan : Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Tercapainya pembinaan dan permasyarakatan olahraga	3/3 kelurahan		525.739.720		525.739.720
1	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Kebudayaan						309.400.660
	Program Pengembangan Nilai Budaya						309.400.660
1	Kegiatan : Pelestrarian dan Aktualisasi Seni Budaya Daerah	pembinaan desa pekraman,sekaha teruna, dharma santih, parade ogoh-ogoh, kreativitas seni, lomba UDG dan pentas budaya	1 kali		309.400.660		309.400.660
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan						32.550.700
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah						32.550.700
1	Kegiatan : Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	terlaksananya perencanaan pembangunan	1 kali 11 desa/ kel		32.550.700		32.550.700
	Dinas Penanaman Modal dan PTSP						6.770.348.200
	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Komunikasi Dan Informatika						264.450.000
	Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media						264.450.000

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kegiatan : Penyebarluasan informasi perijinan	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan		-	264.450.000	-	264.450.000
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Penanaman Modal							748.695.000
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi							334.980.000
2	Kegiatan : Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya jumlah investasi di Kota Denpasar	1 kali	-	240.300.000	-	240.300.000
3	Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	Meningkatnya jumlah investasi di Kota Denpasar	100%	-	94.680.000	-	94.680.000
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi							413.715.000
4	Kegiatan : Pembinaan dan Pelaporan	Meningkatnya jumlah investasi di Kota Denpasar	100%	-	37.115.000	-	37.115.000
5	Penyusunan Kajian Nilai Investasi di Kota Denpasar	Meningkatnya jumlah investasi di Kota Denpasar	1 laporan	-	111.200.000	-	111.200.000
6	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	Meningkatnya jumlah investasi di Kota Denpasar	1 laporan	-	111.200.000	-	111.200.000
7	Penyusunan Profil Investasi Unggulan dan Buku Direktori Perijinan Kota Denpasar	Meningkatnya jumlah investasi di Kota Denpasar	100 buku	-	124.500.000	-	124.500.000
8	Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Kepada dunia Usaha	Meningkatnya jumlah investasi di Kota Denpasar	1 kali	-	29.700.000	-	29.700.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah							5.635.403.200
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							2.855.144.450
9	Kegiatan : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan	1 laporan	21.600.000	2.833.544.450	-	2.855.144.450
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							1.876.316.750
10	Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan	1 laporan	-	1.568.716.750	307.600.000	1.876.316.750

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						160.000.000
11	Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya kualitas SDM bidang Perijinan dan Penanaman Modal	15 orang	-	160.000.000	-	160.000.000
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik						743.942.000
12	Kegiatan : Penyusunan Sertifikasi ISO	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan	1 laporan	-	227.500.000	-	227.500.000
13	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan perijinan	Terciptanya produk inovasi peningkatan kualitas pelayanan perijinan	1 sistem	-	172.800.000	150.000.000	322.800.000
14	Monitoring Pelayanan Perijinan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Meningkatnya penerimaan retribusi perijinan	1 laporan	-	55.060.000	-	55.060.000
15	Peningkatan Evaluasi Pelayanan Perijinan Kepada Masyarakat	Meningkatnya kepuasan pelanggan	1 laporan	-	63.570.000	-	63.570.000
16	Pelayanan Perijinan Keliling	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan	4 kali	-	75.012.000	-	75.012.000
	Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Keuangan						121.800.000
	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						121.800.000
17	Kegiatan : Penyusunan Pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan	1 laporan	-	60.900.000	-	60.900.000
18	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan	1 laporan	-	60.900.000	-	60.900.000
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						7.117.895.512
	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan						432.104.000
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat						432.104.000
1	Kegiatan : Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin (PMT-AS)	Tercapainya Ketahanan Fisik Siswa SD/MI Negeri dan Swasta melalui Perbaikan Gizi Keluarga	500 Siswa		432.104.000		432.104.000
	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pangan						38.460.000

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan						38.460.000
2	Kegiatan : Peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan dewan ketahanan pangan	Meningkatnya Produksi Pangan untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan dalam Negeri	Data dan Solusi		38.460.000		38.460.000
	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa						4.931.998.992
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan						406.228.250
3	Kegiatan : Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan	Pengelola dan Pedagang Pasar Tradisional	35 Pasar		406.228.250		406.228.250
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa						632.743.350
4	Kegiatan : Perlombaan Kelurahan dan Desa Evaluasi	Masyarakat Desa/Kelurahan	8 Desa/ Kel		590.399.850		590.399.850
5	Bulan Bhakti gotong- royong	Tercapainya partisipasi masyarakat desa/kelurahan dalam melaksanakan bulan bakti gotong royong	43 Desa/Kel		42.343.500		42.343.500
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa						29.108.000
6	Kegiatan : Verifikasi Ranperdes APBDes	Terlaksananya Verifikasi APBDes 27 Desa	43 Desa/Kel		29.108.000		29.108.000
	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan						3.794.715.800
7	Kegiatan : Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Terlaksananya pembinaan PKK	43 Desa/Kel		3.794.715.800		3.794.715.800
	Program Penanggulangan Kemiskinan						69.203.592
8	Kegiatan : Pemberdayaan Potensi RTM di Kota Denpasar	Peningkatan Potensi Diri RTM	60 Orang		69.203.592		69.203.592
	Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						1.715.332.520
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						1.193.242.520

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Kegiatan : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Laporan	10.800.000	1.182.442.520		1.193.242.520
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						478.090.000
10	Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pelayanan Administrasi Kantor di BPM dan Pemdes Kota Denpasar	Laporan		404.090.000	74.000.000	478.090.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						44.000.000
11	Kegiatan : Peningkatan kapasitas sumber daya aperatur	Pegawai pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes	Laporan		44.000.000		44.000.000
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan							3.015.767.350
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Perpustakaan							492.579.800
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan						492.579.800
1	Kegiatan : Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	Meningkatnya minat baca masyarakat	1%		206.579.800		206.579.800
2	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, khusus, sekolah dan masyarakat	Jumlah perpustakaan yg tertib administrasi / manajemen perpustakaan dan serta prosentase bertambahnya koleksi perpustakaan pada sekolah sasaran	50 Unit		281.000.000	5.000.000	286.000.000
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Kearsipan							112.815.950
	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah						32.319.800
3	Kegiatan : Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Terkelolanya arsip in aktif di lingkungan Pemkot Denpasar	4 Unit Kerja		32.319.800		32.319.800

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi						80.496.150
4	Kegiatan : Pendokumentasian kegiatan pemerintah Kota Denpasar	Prosentase pendokumentasian kegiatan pemerintah kota Denpasar	70%		75.496.150	5.000.000	80.496.150
	Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						2.410.371.600
	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran						1.774.116.600
5	Kegiatan : Pelayanan administrasi perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan Administrasi perkantoran	100%	6.000.000	1.768.116.600		1.774.116.600
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur						592.255.000
6	Kegiatan : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%		512.755.000	79.500.000	592.255.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						44.000.000
7	Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur	4 Orang		44.000.000		44.000.000
	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik						10.710.898.824
	Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						2.292.950.500
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						1.290.920.500
4	Kegiatan : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Komunikasi dan Informatika	100%	3.000.000	1.287.920.500	-	1.290.920.500
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						958.030.000
5	Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Komunikasi dan Informatika	100%	-	855.030.000	103.000.000	958.030.000

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						44.000.000
6	Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	-	44.000.000	-	44.000.000
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Komunikasi Dan Informatika							8.417.948.324
	Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan Media Massa						8.417.948.324
7	Kegiatan : Unit Pelaksana Teknis Pusat Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika	Pemerintah Kota Denpasar	100%	-	4.994.455.824	-	4.994.455.824
8	Desiminasi informasi melalui radio publik Kota Denpasar	Deseminasi Informasi	100%	-	819.287.500	6.000.000	825.287.500
9	Pameran pembangunan HUT Kota Denpasar	Kota Denpasar		-	679.969.000	-	679.969.000
10	Pengelolaan website dan subdoain, perencanaan dan penyusunan kegiatan dan evaluasi pelaporan pada dinas kominfo kota denpasar	Masyarakat Kota Denpasar	100%	-	190.971.000	-	190.971.000
11	Penyusunan Profil Dinas Kominfo Kota Denpasar	Dinas Komunikasi dan Informatika	1 profil	-	144.270.000	-	144.270.000
12	Pemeliharaan dan penyebarluasan sistem egov di lingkungan pemerintah Kota Denpasar	Pemerintah Kota Denpasar	4 sistem	-	144.770.000	-	144.770.000
13	Perancangan dan Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi pada Pemerintah Kota Denpasar	Integrasi Sistem Informasi	100%	-	88.225.000	100.000.000	188.225.000
14	Pengelolaan infrastruktur jaringan Internet di Kota Denpasar	Pmerintah Kota Denpasar	43 SKPD	-	1.158.000.000	92.000.000	1.250.000.000
Dinas Pertanian							6.631.742.000
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pangan							1.341.728.750
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan						1.341.728.750
1	Kegiatan : Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan.	Meningkatnya kemampuan petani di bidang teknologi tepat guna	8 Kelompok	-	110.755.000	-	110.755.000
2	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	: Meningkatkan pelaku usaha dan pemasaran hasil pertanian	1 Kelompok , 2 Analisa	-	78.812.500	-	78.812.500
3	Pengembangan Diversifikasi Tanaman	Meningkatnya ketersediaan pangan	1 Kali / 5 hari	-	426.635.000	-	426.635.000
4	Pengembangan Perbenihan / Pembibitan	Jumlah luas sawah yang menghasilkan benih padi , kedelai, bawang merah	Padi 5 Ha Kedelai 5 Ha Bawang putih 0,10 ha Bawang merah 0,50 ha	-	141.744.250	-	141.744.250

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Peningkatan Produksi dan Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian	Jumlah Intensitas Produksi padi dalam melaksanakan teknologi pertanian	Benih padi :14.000 Kg Benih Kedelai :7000 Kg Luas Areal : 900 Ha	-	401.204.000	-	401.204.000
6	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah buku hasil kegiatan monev dan evaluasi pada program dan kegiatan Dinas	Buku Lap. Monev : 10 Buku Buku Laptah2014: 25 buku Buku Buku Lakip2014 : 20 Buku Buku Selayang pandang: 30 Buku	-	33.596.000	-	33.596.000
7	Perencanaan dan Penyusunan Pembangunan Pertanian	Jumlah buku hasil kegiatan Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan	Buku RKA&DPA : 120buku Buku Buku Renja : 10 Buku Buku Program&Kegiatan : 10 Buku Buku Renstra 2016-2020 : 25 buku	-	89.400.750	-	89.400.750
8	Pengolahan dan Penyusunan Data Statistik	Jumlah buku hasil kegiatan pengolahan dan penyusunan data Statistik Pertanian	Buku Data Base:20 Buku Sasaran Padi palawija dan Hortikultura :35 Buku Laptah Inventasisasi lahan Sawah : 25 Buku Laporan Tahunan statistik pertanian :30 Buku	-	59.581.250	-	59.581.250
Urusan Pemerintahan Pilihan Pertanian							2.949.075.250
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani							145.534.750
9	Kegiatan : Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Meningkatnya Pelaku Usaha dan Pemasaran Hasil Pertanian	2 Klp	-	33.819.750	-	33.819.750
10	Penyuluhan dan Pendampingan petani dan Pelaku agribisnis	Tercapainya penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	50 Buku/1 kali/ 3 orang/1orang	-	59.300.500	-	59.300.500
11	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Meningkatnya kemampuan petani di bidang teknologi tepat guna	8 Kelompok	-	52.414.500	-	52.414.500
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan							382.002.500
12	Kegiatan : Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Unggulan Daerah	Meningkatnya Pelaku usaha dan pemasaran hasil pertanian	Pameran :4 Kali / Event Pasar Murah : 2 Kali	-	382.002.500	-	382.002.500

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan						486.152.000
	Kegiatan :						
13	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Tepat Guna	Meningkatnya kemampuan petani di bidang teknologi tepat guna	1 Kajian, 200 Orang, 2 Demplot 2 Subak	-	189.410.000	-	189.410.000
14	Pengadaan sarana Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Meningkatnya ketersediaan pangan	Alat pertanian :16 Unit	-	176.585.000	-	176.585.000
15	Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan ModernBercocok Tanam	Meningkatnya kemampuan petani di bidang teknologi tepat guna	4 Kelompok	-	120.157.000	-	120.157.000
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak						382.049.000
	Kegiatan :						
16	Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis	Denpasar	97,15%, 100%, 62.534 ekor, 1.8725 ekor	-	382.049.000	-	382.049.000
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan						657.784.700
	Kegiatan :						
17	Pembibitan dan perawatan ternak	Denpasar	72%, 100%, 97,77%, 87,64% 2.500 ekor, 24.240 ekor, 2.525 ekor, 3.030 ekor,	-	131.700.000	-	131.700.000
18	Pengembangan agribisnis peternakan kepada masyarakat	Denpasar	97,77%, 64,87%, 87,64%, 100%, 96,66%, 20 orang, 1 klp,100 ekor, 10 unit	-	441.500.000	-	441.500.000
19	Pengembangan gizi dan pakan ternak	Denpasar	97,77%, 64,87%, 87,64%, 100%, 72, 100%, 4 klp., 6 sampel	-	84.584.700	-	84.584.700
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan						742.720.500
	Kegiatan :						
20	Promosi atas hasil produksi peternakan Unggulan Daerah	Denpasar	100%, 5 klp.	-	202.530.000	-	202.530.000
21	Penjaminan pangan asal hewan	Denpasar	88,56%, 7939,89 ton	-	39.300.000	-	39.300.000
22	Pengembangan dan pemeliharaan RPH	Denpasar	9.350 ekor, 29.100 ekor,	-	451.343.000	-	451.343.000
23	Penjaminan pangan hasil asal hewan	Denpasar	100%, 3 klp., 50 sampel	-	49.547.500	-	49.547.500
	Program Perencanaan Pembangunan Peternakan, Perikanan dan Kelautan						152.831.800
	Kegiatan :						
22	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan peternakan, perikanan dan kelautan	Denpasar	20 buku, 10 buku	-	48.430.000	-	48.430.000

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan peternakan, perikanan dan kelautan	Denpasar	100%. 10 buku, 20 buku,	-	31.885.800	-	31.885.800
24	Penyusunan data statistik peternakan, perikanan dan dan kelautan	Denpasar	100 %, 10 buku, 10 buku 15 buah, 15 buah, 30 buah	-	72.516.000	-	72.516.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah							2.340.938.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							1.567.838.000
25	Kegiatan : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan dibidang pengelolaan barang/ aset, kepegawaian dan keuangan di likup Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Denpasar untuk mendukung Kinerja SKPD	20%	3.000.000	1.564.838.000	-	1.567.838.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							730.600.000
26	Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pelayanan dibidang pengelolaan barang/ aset, kepegawaian dan keuangan di likup Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Denpasar untuk mendukung Kinerja SKPD	20%	-	656.100.000	74.500.000	730.600.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							42.500.000
27	Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya pelayanan dibidang pengelolaan barang/ aset, kepegawaian dan keuangan di likup Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Denpasar untuk mendukung Kinerja SKPD	20%	-	42.500.000	-	42.500.000
Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan							3.051.946.000
Urusan Pemerintahan Pilihan Kelautan Dan Perikanan							789.877.500

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir						155.252.900
1	Kegiatan : Pengembangan sarana prasarana dan pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	Denpasar	100%, 5 klp	-	155.252.900	-	155.252.900
	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan						103.761.400
2	Kegiatan : Pengembangan sarana prasarana pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan		100%, 20 orang	-	42.261.400	61.500.000	103.761.400
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan						194.725.000
3	Kegiatan : Pengembangan PBI dan BBI		100%, 4.550 kg, 2 unit	-	85.829.000	1.000.000	86.829.000
4	Pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya	Denpasar	100%, 30 or, 10 orang, 2 orang	-	107.896.000	-	107.896.000
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap						160.251.000
5	Kegiatan : Pembinaan dan pengembangan perikanan tangkap	Denpasar	100%, 30 orang, 200 orang,	-	160.251.000	-	160.251.000
	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan						175.887.200
6	Kegiatan : Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Perikanan	Denpasar	100%, 50 sampel., 50 orang	-	111.956.200	-	111.956.200
7	Promosi hasil produk perikanan unggulan daerah	Denpasar	100%, 3 klp	-	63.931.000	-	63.931.000
	Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						2.262.068.500
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						1.263.857.500
8	Kegiatan : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100%	3.000.000	1.260.857.500	-	1.263.857.500
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						954.211.000
9	Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya pelayanan sarana prasarana aparatur	100%	-	832.211.000	122.000.000	954.211.000

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						44.000.000
10	Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tertatihnya SDM	4 OK		44.000.000		44.000.000
Dinas Pariwisata							7.016.624.750
Urusan Pemerintahan Pilihan Pariwisata							3.174.727.500
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata							1.503.657.900
1	Kegiatan : Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata			-	-	-	-
2	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan luar negeri	Masyarakat/Pangsa pasar domestik dan mancanegara	1 kali	-	1.198.660.700	-	1.198.660.700
3	Pengembangan statistik kepariwisataan	Masyarakat dan komponen kepariwisataan	1000 buku	-	73.794.000	-	73.794.000
4	Pelatihan Pemandu Wisata	Komponen pariwisata	1 kali	-	49.320.800	-	49.320.800
5	Penyuluhan kepariwisataan	Seluruh komponen pariwisata	4 kali	-	181.882.400	-	181.882.400
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata							1.097.739.600
6	Kegiatan : Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata			-	-	-	-
7	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	4 Atraksi	100%	-	831.886.650	-	831.886.650
8	Pengembangan, sosialisasi dan penilaian green hotel	Usaha akomodasi	60 orang	-	265.852.950	-	265.852.950
Program Pengembangan Kemitraan							573.330.000
9	Kegiatan : Pengembangan dan penguatan informasi dan data base			-	-	-	-
10	Pengembangan dan Penguatan Litbang, Kebudayaan, dan Pariwisata	Pemerintah Kota Denpasar	500 dokumen	-	397.331.200	-	397.331.200
11	Pengembangan sumberdaya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Pengelola usaha rumah makan	50 orang	-	89.078.500	-	89.078.500
12	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	0	0%	-	-	-	-
13	Pembinaan dan pengawasan usaha rekreasi dan hiburan umum	Pengelola usaha hiburan umum	18 jenis usaha	-	33.147.500	-	33.147.500
14	Pembinaan pengendalian, dan penerbitan usaha jasa dan sarana wisata	Pengelola usaha jasa dan sarana wisata	6 jenis usaha	-	53.772.800	-	53.772.800

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						3.841.897.250
15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Seluruh pegawai	100%	39.400.000	1.849.864.250	-	1.889.264.250
16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peralatan kantor	100%	-	829.940.000	1.078.693.000	1.908.633.000
17	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pegawai Diparda	24 orang	-	44.000.000	-	44.000.000
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan						6.000.000.000
	Urusan Pemerintahan Pilihan Perdagangan						1.997.743.500
1	Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan Kegiatan : Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP)	Pelaku usaha di Kota Denpasar.	100%	-	87.000.000	-	197.000.000
2	Sosialisasi Kebijakan Kemetrolagian	Pelaku usaha dan masyarakat di Kota Denpasar	100%	-	55.000.000	-	55.000.000
3	Pengawasan UTTP dan BDKT	Pelaku usaha dan masyarakat di Kota Denpasar	100%	-	55.000.000	-	55.000.000
	Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor						534.125.000
4	Kegiatan : Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor Impor	Para pengusaha yang berlokasi di Kota Denpasar.	100%	-	65.598.000	-	65.598.000
5	Pengembangan Database Informasi Potensi Unggulan	Para pengusaha yang berlokasi di Kota Denpasar.	100%	-	33.397.000	-	33.397.000
6	Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional	Para pengusaha dan pelaku	100%	-	435.130.000	-	435.130.000
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri						1.266.618.500

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Kegiatan : Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan	Perajin dan Pelaku usaha di Kota Denpasar.	100%	-	244.952.500	-	244.952.500
8	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Para pengusaha/perajin yang berlokasi di Kota Denpasar.	100%	-	186.420.000	-	186.420.000
9	Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil dan Menengah	Perajin dan Pelaku usaha di Kota Denpasar		-	125.373.000	-	125.373.000
10	Pengembangan Pasar dan Monitoring Harga Kebutuhan Bahan Pokok dan Barang Strategis Lainnya Di Pasar Tradisional dan Distributor	Distributor Pelaku usaha di Kota Denpasar	100%	-	125.000.000	-	125.000.000
11	Peningkatan Inovasi Produk Lokal	Para pengusaha dan pelaku ekonomi kreatif yang berlokasi di Kota Denpasar.	100%	-	430.108.000	-	430.108.000
12	Pembinaan Pengelola Usaha Pedagang Pasar Tradisional.	Para pedagang pasar tradisional di Kota Denpasar.	100%	-	154.765.000	-	154.765.000
Urusan Pemerintahan Pilihan Industri							1.727.148.000
Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi							521.155.000
13	Kegiatan : Pengembangan dan Penerapan Manajemen Mutu untuk Mendorong Daya Saing Industri	- 20 orang peserta penerapan GKM - 15 org psrta pelatihan manajemen kewirausahaan - 200 orang sertifikasi profesi - 4 IKM	90%	-	482.543.000	-	482.543.000
14	Pengembangan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi	para perajin/pengusaha kecil dan masyarakat di Kota Denpasar	90%	-	38.612.000	-	38.612.000
Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah							645.253.000
15	Kegiatan : Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah berbasis budaya unggulan	- Perajin dan pengusaha kecil (43 peserta)	90 %	-	645.253.000	-	645.253.000
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri							326.182.550
16	Kegiatan : Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	Para perajin/pengusaha kecil dan masyarakat Kota Denpasar	90%	-	42.612.000	-	42.612.000
17	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	Para pengusaha dan calon pengusaha yang berlokasi di Kota Denpasar	100%	-	283.570.550	-	283.570.550
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial							234.557.450
Kegiatan :							

No	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatif			Plafon Anggaran Sementara
				Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	Para perajin/pengusaha kecil : - Pengusaha dengan IUI baru - Pengusaha industri kerajinan	90%	-	234.557.450	-	234.557.450
Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah							2.275.108.500
19	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Pelayanan Administrasi Perkantoran	90 orang aparatur	100%	10.800.000	1.826.115.250	-	1.836.915.250 1.836.915.250
20	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	90 orang aparatur	100%	-	394.193.250	-	394.193.250 394.193.250
21	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal	4 orang aparatur	100%	-	44.000.000	-	44.000.000 44.000.000
Total				15.002.984.000	527.007.967.110	261.241.524.285	805.527.583.895

4.3. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga pada Tahun 2017 dirancang seperti Tabel 4.3. sebagai berikut :

Tabel 4.3

Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2017

NO	URAIAN	TAHUN 2017 (Rp)
1	Belanja Pegawai	720.943.429.056,47
2	Belanja Bunga	-
3	Belanja Subsidi	-
4	Belanja Hibah	71.279.414.600,00
5	Belanja Bantuan Sosial	3.498.000.000,00
6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	62.042.817.300,00
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	151.912.307.492,13
8	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00
	Total	1.012.675.968.448,60

*) sumber Bagian Keuangan Setda Kota Denpasar

BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

5.1. RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Penerimaan pembiayaan tahun 2017 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya diperhitungkan sebesar Rp. 100.000.000.000,00.

5.2. RENCANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pengeluaran pembiayaan tahun 2017 untuk penyertaan modal dirancang sebesar Rp. 10.500.000.000,00

Tabel 5.1
PROYEKSI PEMBIAYAAN DAERAH TA 2017

NO.	URAIAN	TARGET TAHUN 2017 (Rp)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	89.500.000.000,00
6.1	Penerimaan Pembiayaan	100.000.000.000,00
6.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)	100.000.000.000,00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	
6.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	
6.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	
6.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-
6.1.6	Penerimaan piutang daerah	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	10.500.000.000,00
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	10.500.000.000,00
6.2.3	Pembayaran Pokok Hutang	-
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	

*) sumber Bagian Keuangan Setda Kota Denpasar

BAB VI

PENUTUP

Demikianlah Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2017 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2017.

Denpasar, 26 Agustus 2016

WALIKOTA DENPASAR
selaku,
PIHAK PERTAMA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA DENPASAR
PIHAK KEDUA

IDA BAGUS RAI DHARMAWIJAYA MANTRA, SE.,M.SI,

I GUSTI NGURAH GEDE, SH.
KETUA

I WAYAN MARIYANA WANDHIRA, ST.
WAKIL KETUA

DRS. A. A. KETUT ASMARA PUTRA
WAKIL KETUA

MADE MULIAWAN ARYA, SE.
WAKIL KETUA

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA DENPASAR**

**JL. MARUTI 8 DENPASAR
TEL. (0361) 413357 FAX. (0361) 421822**

<http://bappeda.denpasarkota.go.id>